

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

INDAH WULANDARI WILUJENG

NIM : 4319154

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PENGARUH PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

INDAH WULANDARI WILUJENG

NIM : 4319154

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Wulandari Wilujeng
NIM : 4319154
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap
Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Barat Periode 2019 – 2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Yang menyatakan



Indah Wulandari Wilujeng

NOTA PEMBIMBING

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si

Petodanan Timur RT 002/RW 002, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan
Batang, Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Indah Wulandari Wilujeng

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya

kiriman naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Wulandari Wilujeng

NIM : 43191514

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap
Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Barat Periode 2019 – 2021**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

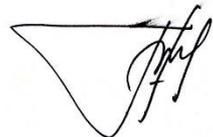
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing



Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si

NIP.199101092020122016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.febi.uingusdur.ac.id | email : febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : **Indah Wulandari Wilujeng**
NIM : **4319154**
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**
Dosen Pembimbing : **Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.**

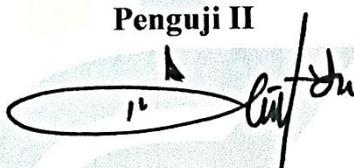
Telah diujikan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I


Agus Arwani, M.Ag
NIP. 197608072014121002

Penguji II


Aditya Agung Nugraha, M.E.
NIP. 19008112019031008

Pekalongan, 11 Agustus 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Fardi Yandi



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Moekhammad Toelus dan Ibu Ekha Lestari yang selalu mendoakan serta mendukung dalam penyelesaian Skripsi.
2. Adik saya, Muhammad Dzannun Mata dan Hunna Himmah Safiqoh
3. Sahabat dan teman-teman saya Kholis, Siti Zulfa, Nadia, Safira, Izzul, Alfath, Novi, Pipit dan Fitria yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan Skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen Wali, Ibu Ria Anisatus Sholihah, MSA yang selalu mengarahkan dalam masa perkuliahan.
6. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
7. Seluruh orang-orang disekitar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan setiap dukungan dan semangat pantang menyerah saat pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

INDAH WULANDARI WILUJENG. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021.

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan terdapat batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan juga pengukuran kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja modal baik untuk kelancaran urusan pemerintahan maupun peningkatan sarana dan prasarana publik. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diprosikan oleh rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan software SPSS versi 26. Menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter serta menggunakan teknik *total sampling* sehingga didapat 81 sampel yang terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019 – 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

INDAH WULANDARI WILUJENG. The Influence of Local Own Revenue, General Allocation Funds, and Local Government Financial Performance on Regency and City Capital Expenditures in West Java Province for the 2019 – 2021 Period

Capital expenditure is part of regional expenditure which is used to budget expenditures made in the context of procuring fixed assets and other fixed assets which have a useful life of more than 12 (twelve) months, are used in local government activities and there is a regulated minimum capitalization of fixed assets. in regional regulations. Factors that affect capital expenditure include the influence of regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), and regional government financial performance as a source of financing as well as measurement of regional financial performance in the implementation of capital expenditure both for the smooth running of government affairs and for improving facilities and infrastructure public. Financial performance in this study is proxied by the independence ratio, the PAD effectiveness ratio, the degree of fiscal decentralization, and the dependency ratio. The purpose of this study was to examine the effect of regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), and local government financial performance on capital expenditure.

This research is quantitative using SPSS version 26 software. It uses secondary data with data collection techniques using the documentary method and uses a total sampling technique so that 81 samples consisting of 27 District and City Governments in West Java Province are obtained for the period 2019–2021.

The results found that PAD and DAU partially had a significant effect on capital expenditure. Regional Government Financial Performance in the form of Dependency Ratio and Fiscal Decentralization Ratio partially has a significant effect on capital expenditure. Meanwhile, the Regional Government Financial Performance in the form of the Independence Ratio and the PAD Effectiveness Ratio partially have no effect on Capital Expenditures.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Local Government Financial

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan material dan moral.
8. Sahabat saya Siti Zulfa, Nadia, Safira, Novi, Pipit, Alfath dan Izzul, semua teman yang telah meberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.
10. Teman-Teman Organisasi saya UKM Seni Musik El-Fata sebagai wadah pengembangan diri penulis selama menjadi mahasiswa.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Penulis,



Indah Wulandari Wilujeng



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Deskripsi Teori	16
1. Teori Stewardship	16
2. Belanja Modal	17
3. Pendapatan Asli Daerah	19
4. Dana Alokasi Umum.....	22
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	31
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Jenis Penelitian	37
C. Setting Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Variabel Penelitian.....	38
F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	45
H. Metode Analisis Data.....	45
1. Uji Statistik Deskriptif	45
2. Uji Asumsi Klasik	46
3. Uji Linear Berganda	48
4. Uji Hipotesis	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Hasil Analisis Data	51
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Keterbatasan Penelitian.....	76
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	I
Lampiran I Data PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	II
Lampiran II Uji Statistik Deskriptif	V
Lampiran III Uji Normalitas	VI
Lampiran IV Uji Multikolinearitas	VII
Lampiran V Uji Heteroskedastisitas dan <i>Scatterplot Model</i>	VIII
Lampiran VI Uji Autokorelasi	X
Lampiran VII Uji Regresi Linear Berganda.....	XI
Lampiran VIII Uji t	XII
Lampiran IX Koefisien Determinasi	XIII
Lampiran X Tabel Nilai t	XIV
Lampiran XI Daftar Riwayat Hidup	XV

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

	فُرُوضٌ		
--	---------	--	--

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مَوْنَتْ : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

J. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

K. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

L. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

M. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

N. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

O. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntaś*

P. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
---	------------------------------------	---------	-----------------

2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>
---	--	---------	-----------------

Q. Kata Sandang Alif + Lam

3. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

4. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

R. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

3. Ditulis kata per kata, atau
4. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021	2
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021	6
Tabel 3.3 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021	8
Tabel 4.4 Tingkat Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021	8
Tabel 4.5 Tingkat Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021	8
Tabel 4.6 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Definisi Operasional	43
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Autokorelasi	48
Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.6 Uji Glejser	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	61
Tabel 4.10 Hasil Uji t	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67

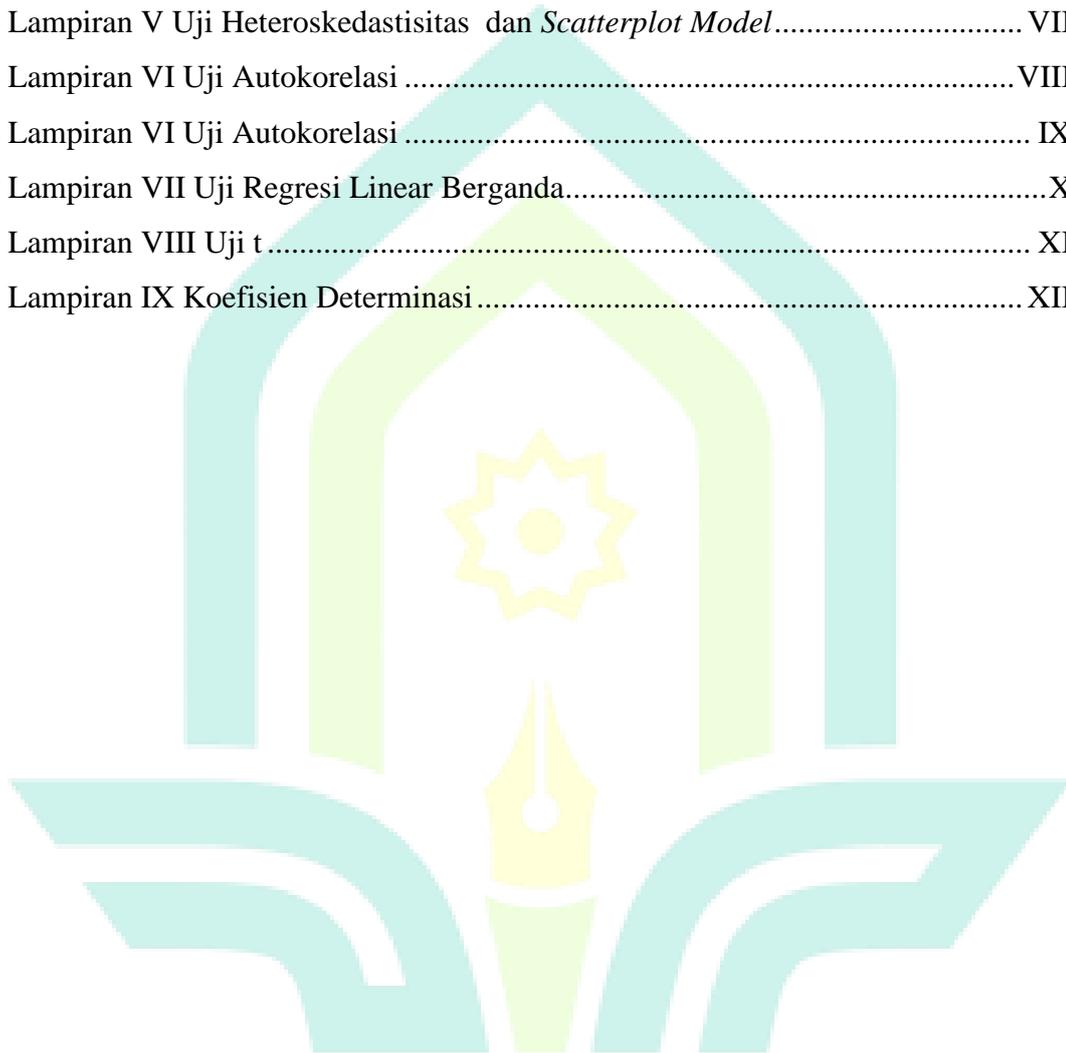
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	4
Gambar 4.5 <i>Scatterplot Model</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	II
Lampiran II Uji Statistik Deskriptif	IV
Lampiran III Uji Normalitas	V
Lampiran IV Uji Multikolinearitas	VI
Lampiran V Uji Heteroskedastisitas dan <i>Scatterplot Model</i>	VII
Lampiran VI Uji Autokorelasi	VIII
Lampiran VI Uji Autokorelasi	IX
Lampiran VII Uji Regresi Linear Berganda.....	X
Lampiran VIII Uji t	XI
Lampiran IX Koefisien Determinasi	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 1997, ketika pemerintah Indonesia dilanda krisis ekonomi, pemerintah mendelegasikan sebagian dari otoritas pengelolaan keuangannya kepada daerah dengan keyakinan bahwa daerah dapat membiayai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan masyarakat berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas, hak, dan kekuasaan suatu daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan bertindak untuk kepentingan umum dikenal sebagai “otonomi daerah.” Dengan kata lain otonomi daerah dijalankan dengan maksud mengembangkan potensi daerah, menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya daerah, serta indikator kemandirian pemerintah daerah (Hastuti, 2018).

Pengalokasian belanja modal secara mandiri termasuk salah satu wujud dari otonomi daerah. Akuisisi aset tetap yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah seringkali merupakan mayoritas dari belanja modal. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal keuangan daerah. Perkembangan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh seberapa baik keuangannya dikelola.

**Tabel 1.1 Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021**

Tahun	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Modal
2019	129.716,96 M	42.591,30 M	19.634,12 M
2020	128.048,15 M	41.030,29 M	14.070,13 M
2021	130.637,22 M	41.210,71 M	15.530,13 M

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Berdasarkan tabel diatas, semua model belanja di Provinsi Jawa Barat banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan, sebaiknya APBD yang dialokasikan kepada belanja pegawai dikurangi, sehingga dapat diberikan kepada belanja modal yang sifatnya dapat digunakan dengan waktu lama. Meskipun fenomena ini terjadi pada beberapa pemerintah daerah, akan tetapi hal ini merupakan sebuah permasalahan karena idealnya peningkatan atau besarnya penerimaan juga diikuti dengan peningkatan belanja modal. Selain itu juga terjadi fluktuasi pada belanja modal. Menurut kajian yang dilaksanakan Universitas Gadjah Mada bahwa ada banyak daerah dengan jumlah belanja pegawai diatas 30%. Untuk mengurangi alokasi belanja pegawai wajib dilaksanakan secara perlahan-lahan. Bahkan ada juga presentase 60-70% dana APBD dihabiskan untuk kegiatan administrasi juga kepegawaian. Oleh karena itu, suntikan dana dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat diperlukan unruk membangun pemerintah daerah (Kristianus, 2022).

Thomas (2019) menyatakan bahwa Sri Mulyani, seorang menteri keuangan negara telah mengamati bahwa perjalanan dinas tampaknya

menggunakan sekitar 13,4 persen dari dana APBD. Selanjutnya, menyumbang sekitar 17,5% dari layanan kantor. Saat ini, besarnya belanja pegawai mencapai sekitar 36%. Menteri keuangan mencapai kesimpulan bahwa sekitar 70% dari belanja APBD langsung digunakan untuk kebutuhan pegawai pemerintah daerah. Menurutnya, ironisnya masyarakat hanya menerima sepertiganya atau 30% saja. Ia mengatakan bahwa bagian dari anggaran tersebut harus diubah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jelas bahwa belanja modal, yang memiliki peranan yang sangat penting serta memiliki pengaruh besar bagi pembangunan daerah malah mendapatkan porsi yang kecil.

Fikri (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat A Koswara mengatakan bahwa total jalan di Jawa Barat sepanjang 2.360 kilometer sekitar 1.400 kilometer atau 60 persen jalan akan memasuki batas umur konstruksi. Ia mengatakan jalan yang sudah memasuki batas umur konstruksi harus dibongkar dan dibangun kembali. Estimasi biayanya Rp 4,3 triliun. Silondae (2016) menyatakan bahwa, dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan.

Belanja modal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD dijadikan alternatif sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintah dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat. PAD bisa menjadi suatu masalah yang utama. Semakin besar peranan PAD didalam kerangka keuangan daerah semakin tinggi juga kapasitas keuangan yang dimiliki daerah (Rizal & Erpita, 2019).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karyadi & Tamam (2017), PAD memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, dana alokasi umum (DAU) juga dapat menunjang pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jumlah total alokasi anggaran negara yang digunakan

untuk menyeimbangkan sumber daya keuangan daerah dan menyediakan kebutuhan staf dan peralatan dari prakarsa desentralisasi (Siregar , 2017). Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya (Karyadi & Tamam, 2017). Penelitian Karyadi & Tamam (2017) menyebutkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DAU mengalami pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan bahwa sebagian besar TKDD itu, DAU (Dana Alokasi Umum) berkorelasi positif dengan belanja pegawai. Oleh karena itu, semakin besar DAU-nya, semakin habis untuk belanja pegawai. Sedangkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap belanja modal. Artinya, kata sri mulyani, belanja modal daerah sangat bergantung kepada transfer pusat. Dengan demikian, beliau mengatakan bahwa telah terjadi fenomena *crowding out*, yaitu ketika pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama belanja produktif. Padahal Fungsi utama DAK adalah untuk melengkapi total anggaran

TKDD dan APBD. Di sisi lain, ia menekankan kecilnya persentase (24,7%) pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (Akbar, 2021).

Kemudian naik turunnya anggaran belanja modal pada daerah Provinsi Jawa Barat seperti ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintahan karena belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, dan sebaliknya. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan.

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
2019	44.150,91 M	36.386,22 M
2020	39.915,36 M	32.798,66 M
2021	45.351,78 M	32.619,06 M

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa dana alokasi umum Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di setiap tahunnya dan dana alokasi khusus Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Selain itu, terjadi fluktuasi pada pendapatan asli daerah walaupun angkanya cenderung cukup tinggi. Seharusnya ketika PAD tinggi belanja modal juga tinggi karena idealnya peningkatan penerimaan juga diikuti peningkatan belanja modal. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan: Secara nasional, PAD saat ini masih sangat terbatas dan masih sangat tergantung pada transfer ke daerah. Ketergantungannya mencapai 80,1%, dengan kontribusi PAD

hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018). Pengelolaan daerah yang tepat sesuai dengan aturan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. (Prasasti, 2013).

Dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk pemerataan kekuatan keuangan pada setiap pemda sehingga diharapkan tidak ada ketimpangan keuangan antar pemda. Dengan adanya dana perimbangan yang besar setiap daerah dapat dialokasikan salah satunya untuk belanja modal. Selaras dengan PAD, semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu pemda seharusnya mampu meningkatkan jumlah belanja modal suatu daerah tersebut. Akan tetapi, jika dilihat data dari djpk.kemenkeu.go.id, jumlah Belanja Modal Provinsi Jawa Barat cenderung turun sejak 2019 hingga 2021. Padahal jika ditinjau dari jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat cenderung besar dan meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021.

Dalam konteks pemda, ruang lingkup anggaran menjadi signifikan dan relevan. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam rangka tugas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, DPRD akan memantau kinerja anggaran pemerintah melalui anggaran. Kewenangan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Danius, 2022). Sebagai sarana penanggulangan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus mampu menyalurkan anggaran belanja modal secara efektif sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Sesuai dengan berbagai kewenangan yang diberikan, anggaran diberikan kepada tingkat pemerintahan yang rendah dari

tingkat pemerintahan yang tinggi demi mendukung tugas dan fungsi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.3 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Presentase Kemandirian
2019	44.150,91 M	68.777,85 M	64%
2020	39.915,36 M	67.159,91 M	59%
2021	45.351,78 M	69.736,25 M	65%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Tabel 1.4 Tingkat Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Penerimaan PAD	Presentase Desentralisasi fiskal
2019	44.150,91 M	43.049,79 M	102,56%
2020	39.915,36 M	50.219,92 M	79,48%
2021	45.351,78 M	49.585,57 M	91,46%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Tabel 1.5 Tingkat Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Presentase Ketergantungan
2019	68.777,85 M	131.242,24 M	52%
2020	67.159,91 M	124.296,09 M	54%
2021	69.736,25 M	131.908,84 M	52%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Tabel 1.6 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan	Presentase Desentralisasi fiskal
2019	44.150,91 M	131.242,24 M	36%
2020	39.915,36 M	124.296,09 M	32%
2021	45.351,78 M	131.908,84 M	34%

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Berdasarkan keempat tabel diatas bisa dilihat rendahnya Rasio Kemandirian dari tahun 2019 sampai 2021 dimana persentase berada pada presentase yang kriterianya tergolong rendah. Begitu juga dengan presentase rasio efektivitas PAD daitahun 2020 dan 2021 kurang dari 100% yang tergolong belum efektif serta presentase rasio ketergantungan lebih dari 50% yang tergolong cukup besar. Sedangkan tujuan pelaksanaan otonomi adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah serta dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa Provinsi baik Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki kinerja keuangan yang rendah. Rendahnya kinerja keuangan tersebut akan berdampak terhadap kemandirian daerah Provinsi Jawa Barat dalam membiayai keperluan belanja yang menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah memiliki instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang berarti penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Putri & Rahayu (2019) menunjukkan kinerja keuangan berupa

derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, secara simultan juga berpengaruh. Sedangkan penelitian Devi, Masnila, & Nurhasanah (2022) bahwa rasio ketergantungan pada keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Selain itu, alasan peneliti menggunakan Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa perbedaan dan prestasi dibandingkan dengan provinsi lain khususnya pada tahun 2019, 2020, 2021. Pada 2020, ITB dari Bandung menduduki peringkat ke-50 dalam QS World University Rankings yang mencerminkan kualitas pendidikan tinggi di provinsi ini (Atmaja et al., 2021). Lalu, Jabar memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan kontribusi dari berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata (Jabarprovgoind, 2023). Pada 2021, Jabar berhasil menarik investasi dalam skala besar, memperkuat daya saing ekonomi daerah (Nengsih, 2021). Saat pandemi, Jabar menghadapi tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi secara aktif berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus dengan langkah-langkah seperti pembatasan sosial dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Jabar juga berusaha mengembangkan inovasi teknologi dalam beberapa sektor, termasuk pertanian dan pelayanan publik (Gartika et al., 2022). Hal tersebut termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Provinsi Jawa Barat kurang mampu dalam mengatur anggaran belanja modal yang akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan wilayahnya. Sedangkan, belanja modal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui beberapa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Sehingga, untuk dapat menyusun jumlah anggaran belanja modal dengan tepat yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan daerah pada Provinsi Jabar. Azhar (2017) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal yang penulis tuangkan dalam judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
3. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
4. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
5. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
6. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara Bersama Sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
2. Untuk Menganalisis Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
3. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
4. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
5. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021
6. Untuk Menganalisis Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021.
7. Untuk Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara Bersama Sama

terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Periode 2019 – 2021

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menambah informasi, wawasan dan acuan dalam menilai Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD serta dapat menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memberi pemahaman terkait teori akuntansi sektor publik dalam praktik penerapannya pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat serta untuk melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan manfaat, membantu mengantisipasi atau memecahkan masalah yang ada di kota maupun kabupaten di provinsi Jawa Barat yang dapat berguna bagi pemerintahan dalam pengambilan keputusan juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemda di berbagai wilayah.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Temuan penelitian diharapkan dapat meningkatkan khasanah Ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi pemerintahan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini berpotensi untuk memajukan pengetahuan ilmiah dan berfungsi sebagai salah satu sumber bagi peneliti masa depan atau peneliti selanjutnya

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Hal ini ditempatkan dibagian awal skripsi dengan tujuan agar dapat dipahami mengapa peneliti meneliti ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang didalamnya memuat teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Alasannya untuk mengetahui teori apa yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian pada bab ini berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV berisi hasil analisis data dan pembahasan yang

didapatkan melalui metode yang telah dideskripsikan pada metode penelitian dan penafsiran terkait hasil analisis data yang telah diuji.

Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan juga saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Menurut James David (1997) *stewardship theory* merupakan hubungan dua pihak antara *principal* atau pemilik (pemegang saham) dan *steward* yakni manajer. Terbentuknya perusahaan yang kuat baik dari segi ekonomi maupun organisasi merupakan bentuk keberhasilan dari hubungan antara *steward* dan *principal*. Ia juga mengasumsikan teori ini memiliki hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan suatu organisasi. Teori ini memandang bahwa manajemen merupakan tulang punggung dalam keberhasilan dalam suatu organisasi yang dapat mensejahterakan pemilik. Teori ini juga mengklaim bahwa keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui kerjasama organisasi yang efektif dan efisien sehingga memberikan kepuasan kepada pemilik dan pengelola (Jefri, 2018).

Implikasi dari teori *steward* dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah dinilai dapat diberikan kepercayaan untuk berperan dan bekerja berdasarkan kepentingan bersama yaitu mengerjakan kewajiban dan fungsi pengelolaan daerah dengan tepat serta mempertanggungjawabkan atas pelimpahan kekuasaan dan sumber daya yang telah diberikan kepada daerah tersebut sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang menjadi tujuan utama Pemerintah Pusat akan tercapai. Hubungan penelitian ini dengan teori *Stewardship* adalah bagaimana pemerintah

sebagai Steward dan masyarakat selaku Principal dimana amanah yang telah diberikan masyarakat kepada lembaga pemerintahan untuk memberikan fasilitas pelayanan yang maksimal serta memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Apabila pemerintah mampu memperhatikan alokasi belanja modal yang dialokasikan semestinya untuk kebutuhan prioritas serta mengoptimalkan sumber pendapatannya, maka rakyat akan merasa puas atas upaya pemda dalam mensejahterakan rakyatnya (Salsabila & Rahayu, 2021). Dalam teori ini pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan pemerintahan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Jika hal tersebut tercapai dijalankan dengan baik oleh pemerintah, maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemda, baik dalam mengelola PAD, DAU maupun kinerja keuangan pemda yang bertujuan untuk Belanja Modal tersebut.

2. Belanja Modal

Sesuai dengan prinsip kepatutan, persyaratan, dan kapasitas daerah, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberikan kemampuan guna memutuskan jumlah total sumber daya yang dialokasikan ke dalam Belanja Modal. Belanja modal merupakan sejenis belanja pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework*

(*MTEF*), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengalokasian aset tersebut dalam jangka panjang (Karyadi & Tamam, 2014).

Belanja modal digunakan dalam proses penganggaran untuk memperhitungkan biaya yang terkait dengan perolehan aset jangka panjang dan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini digunakan untuk kegiatan pemda dan terdapat batasan minimal kapasitas aset tetap yang diatur dengan peraturan daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang akan memberikan manfaat di masa mendatang dan diperhitungkan sebagai aset. Penggunaan belanja modal yang dibeli dengan melalui proses lelang atau tender (Widyastuti, 2017).

Anggaran belanja modal pemerintah dalam APBD telah dialokasikan pendanaan untuk meningkatkan aset tetap. Belanja modal disalurkan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan juga fasilitas publik sehingga memudahkan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus mengubah komposisi belanjanya karena selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pengeluaran harus digunakan untuk tujuan produktif, seperti melakukan kegiatan pembangunan (Karyadi & Tamam, 2014).

Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemda harus berdasarkan kepentingan publik, sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْأَسْوَءِ

لْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءَ الْوَجْهِ الْعَرَبِيَّةِ يَعْزُكُم لَعْنُكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia harusnya berlaku adil, berbuat kebaikan serta melarang berbuat kemungkaran. Pemda selaku *ulil amri* pada wilayah tersebut sudah seharusnya menerapkan prinsip ini. Belanja modal yang dikeluarkan pemda memang sudah sepatutnya untuk kepentingan masyarakat luas juga keadilan sosial.

3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan oleh daerah dan berdasarkan peraturan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan yang dipungut sesuai dengan pendapatan asli daerah. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 sumber pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Siregar (2017) menyatakan bahwa PAD merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber daerah di dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan sangat penting. Hal ini karena sektor tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa baik suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PAD ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Indikator PAD disediakan di bawah ini:

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah secara garis besar dibagi menjadi pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang penggunaan dan pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah meliputi pajak hotel, hiburan, restoran, galian, lampu jalan, parkir, dan banyak lagi (Siregar, 2017).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi. Dalam hal ini retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya KTP dan akte, layanan pemakaman, parkir jalan umum, pasar, pemeriksaan pemadam kebakaran, pengujian kendaraan bermotor, dan layanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, tempat rekreasi sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin trayek, ijin peruntukan penggunaan tanah, dan sebagainya (Danius, 2022).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta atau golongan usaha masyarakat. (Danius, 2022).

Sebagian laba dari perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, keuangan, dan sebagainya contohnya jasa air bersih (PDAM), jasa pada sector pertanian, perkebunan, industry dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien untuk melayani

masyarakat serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (Danius, 2022)

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Siregar (2017) lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik pemerintah daerah. Berikut jenis pendapatannya:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- 2) Penerimaan jasa giro
- 3) Penerimaan bunga deposito
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

4. Dana Alokasi Umum

DAU termasuk bagian dari Dana Transfer Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, untuk membenarkan bahwa semua daerah memiliki akses ke pendanaan yang cukup untuk persyaratan terkait desentralisasi, negara mengalokasikan dana dari anggaran negara ke dalam kumpulan yang dikenal sebagai Dana Alokasi Umum. Pendapatan APBN disalurkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2017).

Menurut Purpitasari (2015) DAU merupakan komponen terbesar Dana Perimbangan dan perannya sangat strategis dalam mewujudkan keadilan pemerataan antar daerah. Sementara itu, porsi yang relatif besar dan penggunaannya yang luas memberikan makna otonomi yang lebih realistis bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbang keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan DAU dalam suatu daerah ditentukan dengan menggunakan fiscal gap. Dalam hal ini kebutuhan DAU ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah yang melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

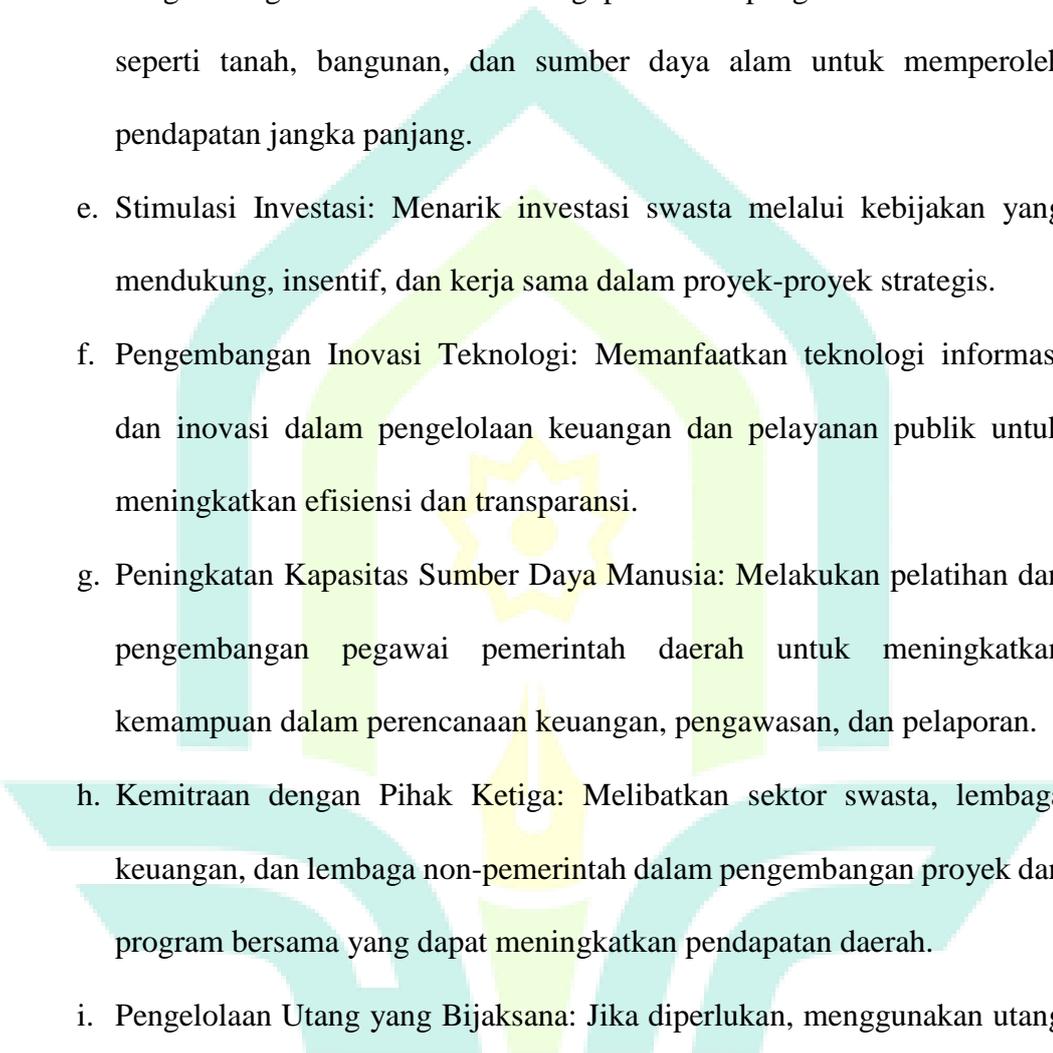
Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada pencapaian kinerja keuangan daerah, seperti pendapatan dan belanja daerah, melalui penggunaan rasio keuangan yang ditentukan oleh kebijakan atau peraturan peundang-undangan selama periode anggaran. Analisis rasio keuangan yang bersumber dari APBD dapat digunakan untuk memberikan gambaran stabilitas keuangan daerah. Rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan contoh ukuran keuangan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2014).

Semakin tingginya rasio kemandirian maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada bantuan pihak eksternal (terutama

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Semakin tinggi tingkat atau tahap dari kemandirian daerah alhasil daerah akan mampu menyediakan reparasi publik yang bermutu (Supriyadi & Ahmad, 2021). Oleh karena itu harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerahnya (Haryanto, 2018).

Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah merupakan tujuan penting dalam mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Berikut adalah beberapa langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini (Syam & Zulfikar, 2022):

- a. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, hasil produksi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan dan meningkatkan fleksibilitas keuangan.
- b. Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak dan retribusi melalui pemantauan yang ketat, teknologi informasi, dan penegakan hukum yang tegas.

- 
- c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal: Fokus pada pengembangan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi, seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan sektor lainnya. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.
 - d. Pengembangan Aset Daerah: Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan jangka panjang.
 - e. Stimulasi Investasi: Menarik investasi swasta melalui kebijakan yang mendukung, insentif, dan kerja sama dalam proyek-proyek strategis.
 - f. Pengembangan Inovasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 - g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
 - h. Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, dan lembaga non-pemerintah dalam pengembangan proyek dan program bersama yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
 - i. Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Jika diperlukan, menggunakan utang dengan bijaksana untuk mendukung proyek-proyek strategis yang memiliki potensi pengembalian investasi yang baik.

- j. **Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan.
- k. **Pengembangan Kewirausahaan Daerah:** Mendorong kewirausahaan lokal dan pengembangan UMKM dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran.
- l. **Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif:** Mengembangkan produk dan layanan inovatif yang dapat menghasilkan pendapatan baru, seperti pariwisata budaya, ekowisata, atau produk-produk unggulan daerah.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Tujuan pengukuran rasio ini untuk memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal mengerahkan pemasukan PAD sesuai dengan apa yang menjadi target awal. Kemampuan daerah untuk melaksanakan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen (Supriyadi & Ahmad, 2021).

Dalam rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan perbandingan jumlah pendapatan transfer ke daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan

keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Harahap, 2020).

Rasio Desentralisasi Fiskal menggambarkan kemampuan sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dari segi finansial. Derajat desentralisasi fiskal mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi sangat bergantung dengan PAD, jika PAD suatu daerah tinggi maka derajat desentralisasinya akan tinggi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan diketahuinya derajat desentralisasi fiskal ini dapat digunakan untuk evaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Arif et al., 2022).

B. Telaah Pustaka

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Wijayanti	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal	Dependen - Belanja Modal Independen - PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan Daerah	- PAD, DAU dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. - DBH, DAU derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.	Terdapat variabel pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan daerah di independen dan belanja modal di dependen dan objek penelitiannya sama	Menggunakan variabel dana perimbangan pada variabel x dan tahun penelitiannya yang berbeda yaitu menggunakan tahun 2010 – 2014
2	Damar Daru Sukmaji, Abdul Rohman (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017	Dependen - Belanja Modal Independen - PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan tingkat efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan	Terdapat variabel pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan daerah di independen dan belanja modal di dependen.	Menggunakan variabel dana perimbangan pada variabel x dan objek penelitiannya yang berbeda
3	Vanesha et al., (2019)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana	Dependen: -Belanja Modal	secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan	Terdapat persamaan pada	Terdapat perbedaan pada tidak digunakannya

		alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Independen -PAD -DAU -DAK	terhadap belanja modal. Namun demikian, pengaruh DAU terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi hanya sebagian.	variabel X dan variabel Y	Kinerja Keuangan Pemda pada variabel bebas, selain itu objek penelitian juga berbeda
5	Yani rizal & Erpita (2019)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa”	Dependen: - Belanja Modal Independen: - PAD	Dari hasil uji t dijelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa.	Terdapat persamaan pada variabel X dan variabel Y	Terdapat perbedaan pada tidak digunakannya variabel DAU dan Kinerja Keuangan Pemda pada variabel bebas, selain itu objek penelitian juga berbeda
6	Hairiyah, Lewi Malisan dan Zaki Fakhroni (2017)	“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kab/Kota Kalimantan Timur”	Dependen: - Belanja Modal Independen: - PAD - DAU - DAK	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal - DAU memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal - DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Persamaan penelitian ini adalah digunakannya variabel PAD dan DAU sebagai variabel X dan Belanja Modal sebagai variabel Y	Terdapat perbedaan pada penggunaan variabel dimana X2 menggunakan variabel DAK dan tidak adanya variabel kinerja keuangan pemda pada variabel bebas. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam pemilahan objek penelitian
7	Santika Adhi Karyadi dan Abdullah Tamam (2017)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja	Dependen: - Belanja Modal Independen: - PAD - DAU	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Terdapat persamaan pada variabel PAD, DAU, DAK pada variabel X dan	Terdapat perbedaan pada tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pemda pada variabel bebas, dan juga terdapat

		Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014”	- DAK	- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal - DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal - PAD, DAU, DAK secara bersama - sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	belanja modal pada variabel Y	perbedaan pada objek penelitian
8	Akbarurizqillah Al Azhar (2017)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Dependen: - Belanja Modal Independen: - PAD - DAU - DAK	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal - DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. - DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. - Secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Terdapat persamaan pada variabel PAD sebagai variabel X dan variabel belanja modal sebagai variabel Y	Terdapat perbedaan pada tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pmda pada variabel bebas dan variabel X3 sebagai dana alokasi khusus
9	Ferani Inggrid Tiara (2016)	“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan	Dependen: - Belanja Modal	- Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio	Terdapat persamaan pada variabel	Terdapat perbedaan pada variabel Y dengan

		Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur”	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi Independen - Kinerja Keuangan Pemda 	<p>efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio ketergantungan secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal 	kinerja keuangan pemda sebagai variabel X dan variabel belanja modal sebagai variabel Y	tambahan variabel pertumbuhan ekonomi juga terdapat perbedaan pada objek penelitian
10	Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila dan Nurhasanah (2022)	“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Independen - Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal - Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal - Efektivitas PAD dan Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal - Secara simultan Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, 	Terdapat persamaan variabel DAU dan PAD sebagai variabel X dan Belanja Modal sbagai variabel Y	Terdapat perbedaan objek penelitian dilakukan pada lokasi yang berbeda, tidak adanya variabel DAK dan kinerja keuangan pemda

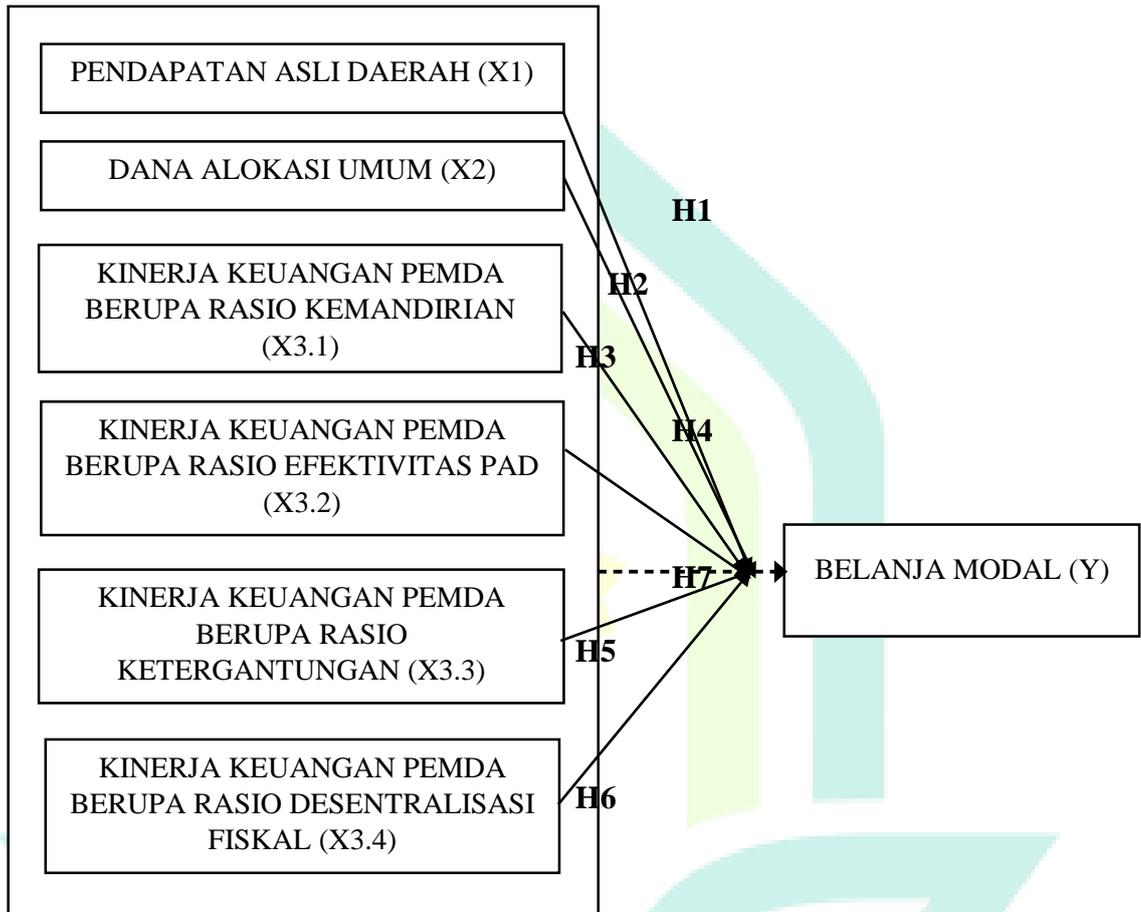
				Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal		
11	Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu (2019)	“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat”	Dependen: - Belanja Modal Independen: - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Kinerja keuangan seperti derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh simultan terhadap belanja modal. - Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Terdapat persamaan yakni Menggunakan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel X dan Belanja Modal sebagai variabel Y. kemudian Objek penelitian yang dilaksanakan sama-sama di provinsi Jawa Barat	Terdapat perbedaan pada tidak digunakannya variabel PAD, DAU, DAK sebagai variabel bebas.
12	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau”	Dependen: Belanja Modal Independen: - PAD - DAU	- Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja modal - dana alokasi umum terdapat pengaruh yang	Terdapat persamaan pada variabel independen yaitu variabel PAD dan DAU serta variabel dependen yaitu belanja modal	Terdapat perbedaan tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pemda pada variabel independen dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian

				signifikan terhadap belanja modal		
13	Iseu Anggareni, Dani Rachman, dan Deus Karlimat	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019”	Dependen: Belanja Modal Independen - PAD - DAU	- PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal - DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Terdapat Persamaan pada ketiga variabel tersebut. Variabel X meliputi PAD dan DAU, Variabel Y belanja modal	Terdapat perbedaan tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pemerintah daerah di penelitian tersebut serta objek penelitiannya berbeda.
14	Fitri Dwi Jayanti (2020)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018”	Dependen: Belanja Modal Independen: - PAD - DAU - DAK	- PAD berpengaruh terhadap belanja modal - DAU berpengaruh terhadap belanja modal - DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Terdapat persamaan pada variabel independen yaitu PAD dan DAU juga dependen yaitu belanja modal	Terdapat perbedaan tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pemda pada variabel independen juga terdapat perbedaan pada objek penelitian
15	Safiul Huda (2019)	“Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2014-2016”	Dependen: Belanja Modal Independen: - PAD - DAU - DAK	- PAD berpengaruh terhadap belanja modal - DAU berpengaruh terhadap belanja modal - DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Terdapat persamaan pada variabel independen yaitu PAD dan DAU juga dependen yaitu belanja modal	Terdapat perbedaan tidak digunakannya variabel kinerja keuangan pemda pada variabel independen juga terdapat perbedaan pada objek penelitian

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka tersebut maka, kerangka berpikir yang dapat di tulis dalam penelitian ini adakah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, dana alokasi umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja

modal, kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio ketergantungan memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Serta PAD, DAU dan kinerja keuangan pemda berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal

D. Hipotesis

Berdasarkan Hipotesis merupakan suatu penjelasan dan hubungan sementara antara dua variabel atau lebih, dan merupakan spekulasi sementara antara dua variabel atau lebih, yang mengakibatkan hipotesisnya harus di uji, dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Berdasarkan analisis ide dan penelitian terkait, hipotesis berikut telah dikembangkan untuk penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Untuk memperoleh sarana dan prasarana dengan lebih baik, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelidiki pendapatan daerah yang distribusinya mencakup kebutuhan daerah. Menurut Halim (2014) desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah. Penelitian Yani, Rizal & Erpita (2019), Yuni Wijayanti (2017) dan Akbarurrizqillah Al Azhar (2017) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penemuan sebelumnya, Jaya dan Dwirandra (2014) menemukan semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dapat digunakan sebagai transfer guna menyamakan atau meratakan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah. Ini berarti bahwa jumlah uang yang didistribusikan dari Dana Alokasi Umum bervariasi antar area. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah di dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah. Penelitian Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) dan Azhar (2017) menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Sudantoko, dalam Tiara (2016) kemandirian dalam arti sempit yaitu kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya sendiri. Dengan belanja modal pemerintah daerah tidak hanya akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat namun juga melakukan investasi yang nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tujuan desentralisasi yaitu kemandirian daerah dapat tercapai. Penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio kemandirian secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₃ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Rasio efektivitas PAD diukur dengan menggunakan rumus membandingkan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD (dianggarkan). Berdasarkan riset Devi, Masnila, dan Nurhasanah (2022) bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sedangkan riset yang

dilakukan Tiara (2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₄: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Salah satu cara untuk mengukur kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan. Rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Fathiyah 2022). Dalam riset Devi, Masnila dan Nurhasanah (2022) rasio ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal, sedangkan riset yang dilakukan oleh Dwirandra & Martini (2014) kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₅ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

6. Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal Berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Sistem desentralisasi dapat meningkatkan akumulasi modal pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem desentralisasi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menggali maupun mengelola potensi-potensi yang dimilikinya. Penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah sesuai dengan teori tradisional dalam teori fiskal federalism bahwa adanya keuntungan alokatif yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₆: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

7. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Riset Danius (2022) menyatakan variabel PAD dan DAU secara simultan memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Oleh karena itu dalam proses pengadaan suatu aset, belanja modal dipengaruhi oleh faktor keuangan yang menjadi faktor pendukung dalam pengadaan aset tersebut. Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier-effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Riset ini selaras dengan Rinta dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan,

efektivitas PAD, efisiensi keuangan, dan derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Dan menurut Riset Tiara (2016) bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah. Sedangkan rasio ketergantungan secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H7: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka. Dimulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data dan menampilkan hasilnya. Data kuantitatif biasanya berbentuk angka ataupun nilai yang diperoleh dari teknik pengumpulan data. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjabarkan dengan teknis matematis karena penelitian ini memakai teori secara hipotesis, yang memiliki kaitan dengan keadaan yang diteliti oleh peneliti.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data sekunder dengan rincian 9 kota dan 18 kabupaten.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan meliputi seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang meliputi 18 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga total sebanyak 27 daerah. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*, yaitu strategi untuk menentukan ukuran sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data penelitian sebanyak 81 dapat dikumpulkan dari sensus 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat, serta penelitian yang mengumpulkan data untuk 3 (tiga), dengan jumlah yang dihitung sebagai berikut:

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode}$

$N = 27 \times 3 \text{ tahun}$

$N = 81 \text{ data}$

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan dianalisis agar menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Variabel dari penelitian ini ada 2 antara lain variabel dependen dan independen.

a) Variabel Dependen

Contoh variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya guna memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran variabel belanja modal dapat diuji menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$$

Sumber: Nugroho & Rohman (2012)

b) Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen merupakan faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau perkembangan variabel dependen. Ada 3 (tiga) variabel bebas di penelitian ini:

1) Pendapatan Asli Daerah (X1)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Berikut ini adalah persamaan untuk melakukan perhitungan:

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah$$

Sumber: Nugroho & Rohman (2012)

2) Dana Alokasi Umum (X2)

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 dijelaskan bahwa dana alokasi umum yang diterima setiap kabupaten/kota disesuaikan dengan "Formula DAU" dimana formula tersebut diperoleh atas dasar perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Dana Alokasi Umum dihitung menggunakan berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Sumber: Nugroho & Rohman (2012)

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = DAU berdasar Celah Fiskal

3) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (X4)

Menurut Tiara (2016) terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah antara lain sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan dari pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan pinjaman daerah untuk mengetahui rasio kemandirian. Jadi semakin tinggi angka rasionya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, rasio kemandirian menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Zukhri, 2020). Berkaitan dengan masalah kemandirian, Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 membahas masalah otonomi dengan mendefinisikan salah satu

definisi desentralisasi dalam sistem Negara Republik Indonesia adalah “pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk tujuan mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan.”

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Sumber: Tiara, 2016

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Sumber: Tiara, 2016

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Harahap, 2020). Persamaan berikut

dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang terkait dengan ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber: Tiara, 2016

d. Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat rasio ini untuk mengukur kemampuan keuangan penda dalam membiayai belanja daerah. Dengan ukuran tersebut dapat disimpulkan besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Untuk rumus penghitungannya:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber: Tiara, 2016

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala dan Sumber Data
Pendapatan Asli Daerah (X1)	<ul style="list-style-type: none"> - Total Pajak Daerah - Total Retrubusi Daerah - Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain – lain pendapatan daerah yang sah 	$PAD = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain – lain pendapatan daerah yang sah}$	Nominal https://djpk.kemenkeu.go.id
Dana Alokasi Umum (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dasar - Celah Fiskal 	$DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$	Nominal https://djpk.kemenkeu.go.id
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian (X3.1)	<ul style="list-style-type: none"> - PAD - Transfer Pusat Provinsi - Pinjaman 	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}} \times 100 \%$	Rasio https://djpk.kemenkeu.go.id
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektifitas PAD (X3.2)	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas PAD - Realisasi PAD - Target Penerimaan PAD 	$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio https://djpk.kemenkeu.go.id
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan (X3.3)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan transfer - Total pendapatan daerah 	$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$	Rasio https://djpk.kemenkeu.go.id

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal (X3.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan asli daerah - Total pendapatan daerah 	Rasio Desentralisasi Fiskal = $\text{PAD} : \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%$	
Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Aset Tak Berwujud 	$\text{BM} = \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Modal Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Modal Aset Tak Berwujud}$	Nominal https://djpk.kemenkeu.go.id

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder digunakan untuk penyelidikan ini. Data tersebut berasal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 2019 – 2021. Di penelitian ini menggunakan metode dokumentasi melalui data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikumpulkan, dicatat, kemudian dikaji sehingga dapat diolah untuk kepentingan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Untuk mengelola data dalam penelitian ini dibutuhkan alat-alat pendukung untuk memperoleh hasil dari pengelolaannya meliputi Microsoft Excel dan program aplikasi SPSS, kemudian akan dilakukan pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis meliputi regresi linear berganda yang terdiri dari uji t dan koefisien determinasi. Adapun metode analisis data pada penelitian ini diantaranya:

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Nasution (2017) statistik deskriptif merupakan bagian statistika mengenai pengumpulan data, pembuatan diagram atau gambar, penyajian sesuatu hal dengan data yang disajikan dalam bentuk mudah dipahami dan dibaca. Dengan kata lain untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel ataupun lebih sifatnya independen guna memperoleh gambaran mengenai variabel-variabel tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji dengan tujuan menilai normalitas distribusi dalam model regresi. Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (Nugraha 2022). Dasar interpretasi dari pengujian ini adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan dianggap tidak normal jika $< 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antarvariabel independen terhadap model regresi penelitian. Riset untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas menggunakan *tolerance value* dan *varianceinflation factor* (VIF). Jadi nilai tolerance yang rendah = nilai VIF tinggi. Apabila nilai tolerance $\geq 0,1$ dan $VIF \leq 10$ maka model tersebut bebas dari multikolinieritas (Nugraha, 2022).

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat SRESID dengan residualnya ZPRED.

Model penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Hipotesis berikut digunakan dalam analisis

- i. Apabila terdapat pola jelas, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu atau teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit) maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- ii. Apabila terdapat pola yang tidak jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y atau tidak teratur, maka diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain uji scatterplot, dalam penelitian ini juga menggunakan uji *Glejser*. Uji ini merupakan uji hipotesis guna mengetahui apakah sebuah model regresi terindikasi terdapat heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Hipotesis berikut digunakan dalam analisis:

- i. Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas
 - ii. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas
- d. Uji Autokorelasi

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji autokorelasi memiliki tujuan untuk melihat apakah pada suatu model regresi terjadi keterkaitan antara model regresi dan perubahan waktu. Uji Durbin-Waston dipakai pada penelitian ini dimana interpretasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Autokorelasi

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Diterima	$du < d < 4-du$

3. Uji Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antar dua variabel atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Nugraha, 2022). Dalam penelitian ini memakai formulasi model dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3.1 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian

X3.2 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD

X3.3 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan

X3.4 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal

e = Error

4. Uji Hipotesis

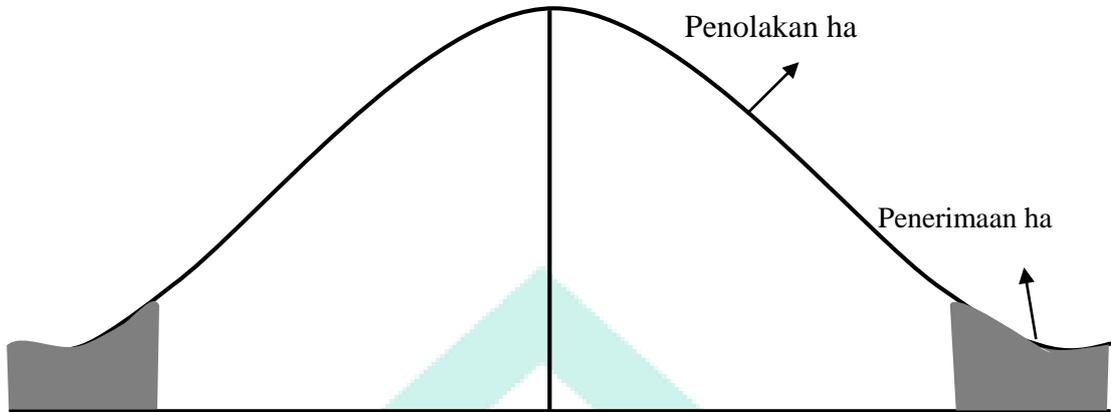
a. Uji t (Parsial)

Tujuan Uji t merupakan instrumen pengujian yang dipakai untuk melihat suatu penjelasan apakah terdapat pengaruh pada setiap variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Ghozali (2016) mendefinisikan pada uji t bisa diambil keputusan melalui langkah-langkah:

- i. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen apabila besarnya signifikansi (sig.) $< 0,05$.
- ii. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen jika tingkat signifikansi (sig.) $> 0,05$.

Dapat disimpulkan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat.

Gambar 3.3 Kurva Uji t



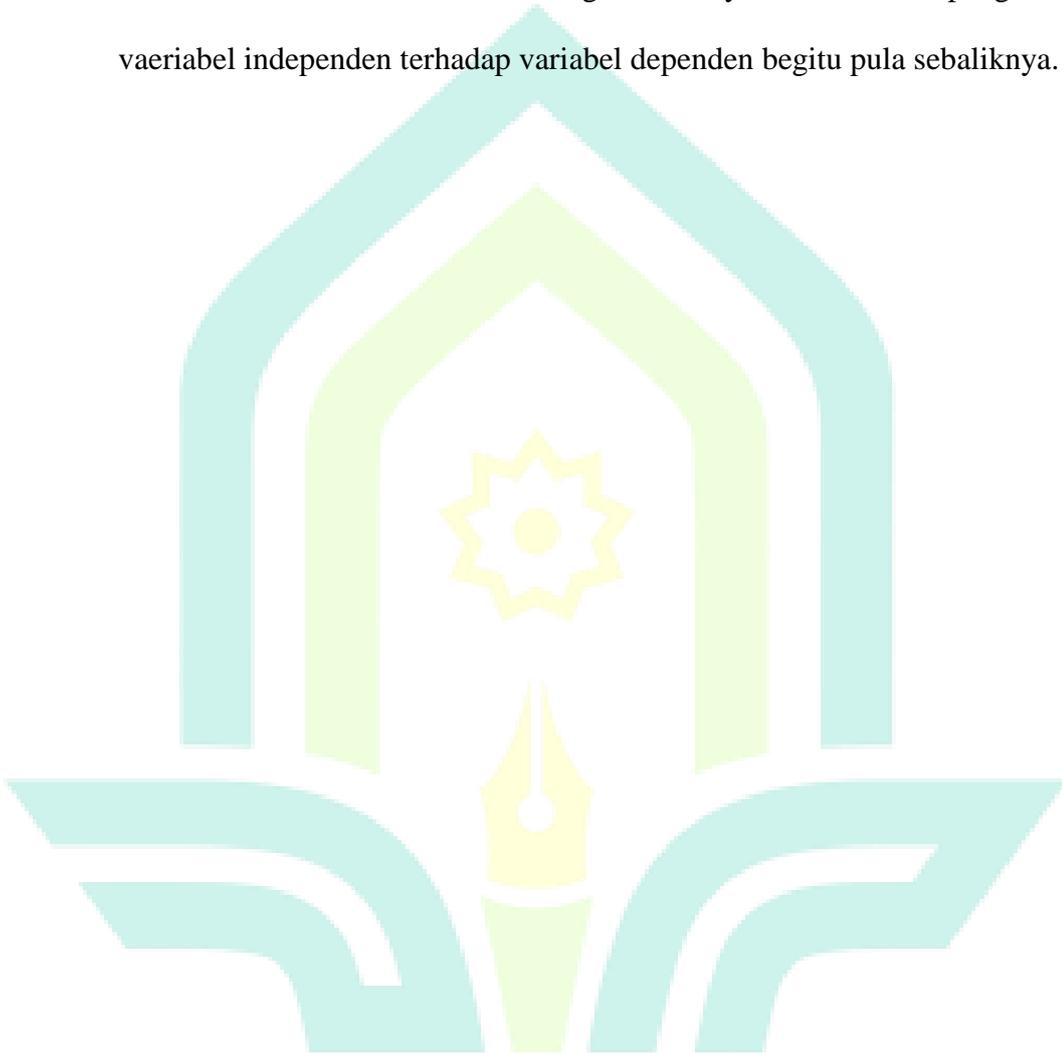
b. Uji f (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai F hitung $<$ F tabel atau signifikansi $>$ 0,05, maka H_a ditolak, artinya bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai F hitung $>$ F tabel atau signifikansi $<$ 0,05, maka H_a diterima, artinya bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5. Uji Koefisien Determinan

Dalam statistik, sejauh mana satu variabel independen mempengaruhi yang lain diukur dengan koefisien determinasinya (R^2). Antara nol dan satu, atau ($0 \leq R^2 \leq 1$), adalah tempat koefisien penentuan ditemukan. Ketika R^2 mendekati angka 1 artinya semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen begitu pula sebaliknya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah provinsi di Republik Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Dalam sudut pandang astronomis, Jawa Barat terletak antara $5^{\circ} - 8^{\circ}$ LS dan $106^{\circ} - 109^{\circ}$ BT dengan luas 37.040 km^2 . Sumber data penelitian ini berupa laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dengan data pada tahun 2019 – 2021 yang diperoleh peneliti melalui internet dari situs djpk.kemenkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Jabar terdiri dari 18 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga total terdapat 27 daerah. Berikut adalah rincian wilayah kabupaten dan kota yang ada diprovinsi Jabar.

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

1. Kab. Karawang	15. Kab. Garut
2. Kab. Bekasi	16. Kab. Kuningan
3. Kab. Bogor	17. Kab. Ciamis
4. Kab. Purwakarta	18. Kab. Pangandaran
5. Kab. Bandung Barat	19. Kota Bogor
6. Kab. Sumedang	20. Kota Bandung
7. Kab. Bandung	21. Kota Sukabumi
8. Kab. Sukabumi	22. Kota Bekasi
9. Kab. Subang	23. Kota Depok
10. Kab. Cianjur	24. Kota Cirebon
11. Kab. Indramayu	25. Kota Cimahi
12. Kab. Tasikmalaya	26. Kota Tasikmalaya
13. Kab. Cirebon	27. Kota Banjar
14. Kab. Majalengka	

Sumber: Data diolah, 2023

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Tujuan dari uji statistik deskriptif yakni untuk menyajikan cerminan data penelitian. Analisis deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	81	100.75	3761.91	855.7809	809.41553
DAU	81	346.71	2159.83	1143.4419	441.80468
RKM	81	5.92	73.54	25.0668	17.57621
REF	81	42.16	145.34	96.9067	17.20952
RKT	81	15.84	76.26	59.1930	12.87596
RDS	81	6.70	73.79	22.7573	12.47088
BM	81	57.42	1701.25	539.4298	337.72877
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Data diolah, 2023

a. Belanja Modal

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimumnya sebesar Rp 57.420.000,00 diperoleh dari kota Banjar pada tahun anggaran 2020 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.701.250.000,00 diperoleh dari kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021. Nilai mean

sebesar Rp 539.429.800,00 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 337.728.770,00

b. Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp 100.750.000,00 diperoleh dari kota Banjar tahun anggaran 2019, dan nilai maksimumnya sebesar Rp 3.761.910.000,00 diperoleh dari kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Nilai mean sebesar Rp 855.780.900.000,00 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 809.415.530,00

c. Dana Alokasi Umum

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimum sebesar Rp 346.710.000,00 diperoleh dari kota Banjar tahun anggaran 2021, dan nilai maksimumnya sebesar Rp 2.159.830.000,00 diperoleh dari kabupaten Bandung tahun anggaran 2019. Nilai mean sebesar Rp 1.143.441.900,00 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 441.804.680,00.

d. Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang

diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian mempunyai nilai minimum 5,92% diperoleh dari kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019, dan nilai maksimumnya sebesar 73,54% diperoleh dari Kota Bekasi tahun anggaran 2021. Nilai mean sebesar 25.06% dan nilai standar deviasi sebesar 17,57621%.

e. Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Efektivitas PAD

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Efektivitas mempunyai nilai minimum 42,16% diperoleh dari kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020, dan nilai maksimumnya sebesar 145,34% diperoleh dari Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2021. Nilai mean sebesar 96,9% dan nilai standar deviasi sebesar 17,20952%.

f. Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Ketergantungan

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Ketergantungan mempunyai nilai minimum 15,84% diperoleh dari kota Bogor tahun anggaran 2021, dan nilai maksimumnya sebesar 76,26% diperoleh dari kota Banjar tahun anggaran 2020. Nilai mean sebesar 59,19% dan nilai standar deviasi sebesar 12,85796%.

g. Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Desentralisasi Fiskal

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 26*. Jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 81. Variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Desentralisasi Fiskal mempunyai nilai minimum 6,7% diperoleh dari kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020, dan nilai maksimumnya sebesar 73,79% diperoleh dari kota Bekasi tahun anggaran 2020. Nilai mean sebesar 22,75% dan nilai standar deviasi sebesar 12,47088 %.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05. Adapun uji normalitas dengan uji one sample kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.49215332
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.038
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas, nilai uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.071 dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047		
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001	.126	7.944
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002	.343	2.917
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715	.122	8.219
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149	.872	1.146
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010	.234	4.267
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045	.182	5.487

a. Dependent Variable: BM

Sumber, Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.126 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 7.944 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,343 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 2.917 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi miltikolonieritas. Pada variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.122 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 8.219 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak

terjadi multikolonieritas. Pada variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Efisiensi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.872 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.146 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Pada variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Ketergantungan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.234 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 4.267 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Dan pada variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Desentralisasi Fiskal memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.182 yang artinya lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 5.487 yang artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Menurut hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen.

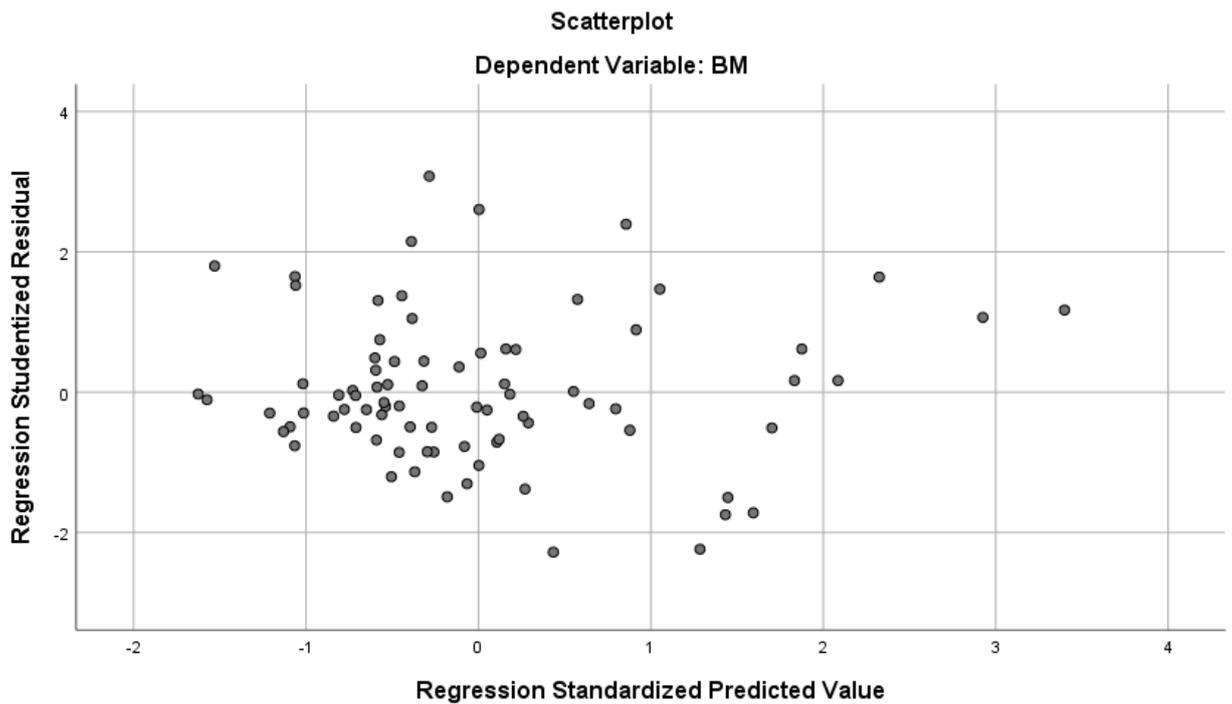
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan bila tidak sama maka disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Uji Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot diantaranya nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED

dengan residualnya SRESID. berikut adalah adalah yang akan terjadi

Uji Scatterplot model:

Gambar 4.5 *Scatterplot Model*



Data diolah, 2023

Hasil *Scatterplot Model* pada gambar 4.5 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas atau data menyebar secara tidak teratur serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6 Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	284.833	153.230		1.859	.067
	PAD	.012	.041	.089	.291	.772
	DAU	.043	.045	.177	.951	.345
	RKM	-.604	1.902	-.099	-.317	.752
	REF	-1.437	.726	-.231	-1.981	.051
	RKT	-1.448	1.871	-.174	-.774	.441
	RDS	1.001	2.190	.117	.457	.649

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel independen tersebut nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas alias terjadi homoskedastisitas karena regresi yang baik yaitu yang terjadi homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi (metode Cochrane-ortutt)

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.998	.998	33.21941	1.737
a. Predictors: (Constant), LAG_X3.4, LAG_X1, LAG_X2					
b. Dependent Variable: LAG_Y					

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi *Durbin-Waston* dengan menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.737, nilai tersebut lebih besar dari dU (1.7164) dan lebih kecil dari 4-Du (2.2836). Jadi dapat disimpulkan $dU < DW < 4-dU = 1.7164 < 1.737 < 2.2836$ artinya data tidak terjadi gejala autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan atau mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3.1} + \beta_3 X_{3.2} + \beta_3 X_{3.3} + \beta_3 X_{3.4} + e$$

Berikut merupakan hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dapat ditarik persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 514,193 + 0,240 + 0,243 + 1,157 + 1,754 - 8,257 - 7,408$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta pada model regresi adalah 514,193. Hal ini menunjukkan jika nilai variabel PAD, DAU, dan Kinerja Keuangan Pemda bernilai 0 maka Belanja Modal akan bernilai 514,193 dan koefisien konstanta bernilai positif artinya dengan adanya variabel PAD, DAU, dan Kinerja Keuangan Pemda maka Belanja Modal (Y) cenderung mengalami peningkatan.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel PAD sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 rupiah maka nilai Belanja Modal akan naik sebesar 0,240.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel DAU sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1 rupiah maka nilai Belanja Modal akan naik sebesar 0,243.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian sebesar 1,157. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian sebesar 1% maka nilai Belanja Modal akan naik sebesar 1,157%.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Efisiensi sebesar 1,754. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Efisiensi sebesar 1% maka nilai Belanja Modal akan naik sebesar 1,754%.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Ketergantungan sebesar -8,257. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Ketergantungan sebesar 1% maka nilai Belanja Modal akan turun sebesar 8,257%.

7. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar -7,408. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 1% maka nilai Belanja Modal akan turun sebesar 7,408%.

b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat atau secara parsial. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai t hitung $>$ t tabel atau signifikansi $<$ 0,05, maka H_0 diterima artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2023

Adapun kriterianya jika nilai Sig. < 0,05 berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai Sig. tepat di angka 0,05 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan t hitung dan t tabel, hasilnya sebagai berikut.

1. H₁ : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,001 (<0,05) dan nilai t hitung 3,571 > t tabel 1,993 maka **H₁ diterima**, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2. H₂ : Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Dana Alokasi Umum (X₂) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,002 (<0,05) dan nilai t hitung 3.249 > t tabel 1,993 maka **H₂ diterima**, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. H₃ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian (X_{3.1}) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,715 (>0,05) dan nilai t hitung 0,367 < t tabel 1,993 maka **H₃ ditolak**, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4. H₄ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD (X_{3.2}) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,149 (>0,05) dan nilai t hitung 1,458 < t tabel 1,993 maka **H₄ ditolak**, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

5. H₅ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan (X3.3) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,010 (<0,05) dan nilai t hitung $-2,661 < t$ tabel 1,993 maka **H₅ diterima**. Jika nilai t hitung minus maka menggunakan kriteria atau patokan kurva pada uji t yang artinya berpengaruh. Jadi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

6. H₆ : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal (X3.4) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,045 (<0,05) dan nilai t hitung $-2,039 < t$ tabel 1,993 maka **H₆ diterima**, artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Uji f (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen atau secara parsial. Tingkat alpha yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dalam

penelitian ini yaitu jika nilai F hitung < F tabel atau signifikansi > 0,05, maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai F hitung > F tabel atau signifikansi < 0,05, maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6910227.095	6	1151704.516	38.483	.000 ^b
	Residual	2214630.800	74	29927.443		
	Total	9124857.895	80			
a. Dependent Variable: BM						
b. Predictors: (Constant), RDS, DAU, REF, RKT, PAD, RKM						

Sumber: Data Diolah, 2023

Dalam melakukan pengujian hipotesis untuk model regresi, diketahui $Df_1 = k - 1 = 7 - 1 = 6$ dan $Df_2 = n - k = 81 - 7 = 74$ dengan nilai alpha 0,05. Sehingga dapat diketahui nilai f-tabel untuk melakukan uji simultan sebesar 2,14. Pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan nilai F-hitung yang diperoleh 38,483 yang berarti lebih besar dari f-tabel 2,14 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_7 diterima, artinya bahwa secara simultan variabel PAD, DAU,

Kinerja Keuangan Pemda berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai yang memberikan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu atau ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen untuk mengungkapkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.757	.738	172.99550
a. Predictors: (Constant), RDS, DAU, REF, RKT, PAD, RKM				

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 didapatkan nilai koefisien *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,757 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 75,7%. Jadi

dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel belanja modal dipengaruhi oleh variabel independen yang dijelaskan pada penelitian ini yaitu PAD, DAU, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipakai oleh penelitian ini.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini akan menguraikan terkait dengan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel pendapatan asli daerah diperoleh t-hitung sebesar 3,571 yang artinya lebih besar dari t tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari PAD terhadap Belanja Modal sehingga dalam hal ini H1 diterima.

Terdapat pengaruh yang positif juga signifikan dari PAD pada Belanja Modal menunjukkan bahwa meningkatnya PAD diiringi dengan tingkat Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa pemda mampu mendistribusikan PAD untuk dimanfaatkan sebagai penambahan aset pemerintah daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja

pemerintah daerah, pembebasan lahan guna pembuatan jalan umum, serta pembangunan fasilitas publik lainnya melalui belanja modal.

Dalam Stewardship teori, hubungan kontraktual antara principal (masyarakat) dengan steward dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan pra sarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari PAD.

Apabila PAD yang dihasilkan meningkat atau tinggi setiap tahunnya, hal ini akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang baik dalam pelaksanaan otonomi, sehingga pemda dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, seperti kegiatan pembangunan daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, pembebasan lahan untuk pembuatan jalan umum dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Jayanti (2020) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Begitu juga dengan riset Hairiyah, Malisan dan Fakhroni (2017) disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal. Dan juga riset oleh Rizal dan Erpita (2019) yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Huda (2019) yang menyatakan bahwa PAD merupakan indikator pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas, pembangunan, pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka belanja modal yang dianggarkan akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum merupakan salah satu dari dana transfer umum yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakannya dalam membiayai atau mendukung pelaksanaan desentralisasi (Anggoro, dalam Danius 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel dana alokasi umum diperoleh t-hitung sebesar 3,249 yang artinya lebih besar dari t tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 maka H2 diterima. Adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal dapat memberikan

penjelasan bahwa dana alokasi umum memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah (Juniawan, 2018).

Pembangunan infrastruktur daerah termasuk kedalam belanja modal pemerintah daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan atau pembaruan jalan umum. Kepala dinas bina marga dan penataan ruang Jawa Barat Ade Koswara mengatakan bahwa total jalan di Jawa Barat sepanjang 2.360 kilometer, sekitar 1.400 kilometer atau 60 persen jalan akan memasuki batas umur konstruksi. Ia mengatakan jalan yang sudah memasuki batas umur konstruksi harus dibongkar dan dibangun kembali. Estimasi biayanya Rp 4,3 triliun (Fikri, 2019).

Tingginya kontribusi DAU yang didapatkan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dialokasi untuk membiayai perbaikan jalan tersebut secara bertahap, karena Silondae (2016) menyatakan bahwa dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan dan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dalam jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika DAU yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DAU mengalami pengaruh yang signifikan

terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi dan Tamam (2017) yakni DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel dengan rasio kemandirian ini diperoleh t-hitung sebesar 0,367 yang artinya lebih kecil dari t tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikansi sebesar 0,715 yang artinya lebih besar dari alpha sebesar 0,05 maka H3 ditolak. Dengan kata lain, pemda kabupaten dan kota Jawa Barat tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih tergolong rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2016) kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas

dan fungsinya dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai minimal 100% (Sularso dan Restianto, 2011). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel kinerja keuangan pemda dengan rasio kemandirian ini diperoleh t-hitung sebesar 1,458 yang artinya lebih kecil dari t-tabel 1,993 dengan nilai signifikansi sebesar 0,149 yang artinya lebih besar dari alpha 0,05, maka H4 ditolak.

Dalam Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas PAD. Dengan membandingkan penerimaan realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, maka efektivitas PAD dapat ditentukan. Kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai dengan tujuannya ditunjukkan oleh rasio efektivitas PAD. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jabar kurang berhasil mencapai PAD yang dimaksud dengan realisasi selama tahun anggaran 2019 – 2021. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan dalam kebijakan nasional terkait pajak atau retribusi dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah jika tidak diimbangi dengan penyesuaian strategi. Jika daerah hanya mengandalkan satu atau beberapa sumber pendapatan utama, maka ketidakpastian di sektor tersebut dapat berdampak besar pada PAD jika terjadi fluktuasi (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019).

Selain itu, pandemi COVID-19 yang merebak di awal tahun 2020 memiliki dampak yang tak terelakkan pada berbagai aspek indikator ekonomi makro yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2018-2023. Perencanaan semula harus menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini, mengingat masa depan ekonomi yang semula terlihat lebih stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, setelah terjangan COVID-19 pada tahun 2020, diproyeksikan oleh IMF hanya mencapai 0,5 persen. Namun, proyeksi dari SDGs Center UNPAD jauh lebih rendah, berkisar antara 1,0 hingga 1,8 persen. Hal ini berada jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang telah diikuti selama beberapa tahun terakhir, yang biasanya berada dalam kisaran 5 persen. Analisis prospek ekonomi yang dilakukan oleh UNPAD bahkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat mengalami penurunan yang lebih signifikan dibandingkan skenario nasional. Rentang proyeksi ini berkisar antara -2,1 persen (skenario pesimis) hingga 0,6 persen (skenario optimis).

Dampak dari kondisi ini tentunya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga merembet ke berbagai agenda pembangunan yang direncanakan. Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami gangguan serius. Terutama, proyeksi peningkatan tingkat pengangguran cukup mengkhawatirkan, diperkirakan akan melonjak dari 8 persen pada tahun 2019 menjadi 12 persen dalam skenario paling buruk.

Dengan demikian, pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika rencana pembangunan dan prospek ekonomi di Jawa Barat serta secara luas di seluruh Indonesia. Tantangan yang dihadapi akan memerlukan respons dan adaptasi yang komprehensif dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak-dampak yang telah diakibatkannya (Bappeda Jabar, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriati, Engkus, dan Anwar (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial terhadap belanja modal begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi, Masnila, dan Nurhasanah (2022) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

5. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio ketergantungan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel kinerja keuangan pemda dengan rasio ketergantungan ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang artinya lebih kecil dari alpha 0,05 dan hasil t-hitung sebesar -2,661 yang jika dilihat dari kurva uji t nilai ini berada pada penolakan H_0 artinya H_5 diterima.

Dari temuan angka yang signifikan dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah hubungan yang negatif artinya bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan, maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan rendah karena dana yang ada lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional.

Ketergantungan keuangan daerah merupakan seberapa banyak uang transfer yang diterima setiap daerah dibandingkan dengan semua pendapatan daerah. Semakin besar presentase ini maka semakin tergantung pemerintah daerah baik kepada pemerintah pusat maupun daerah (Harahap, 2020). Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan belanja modal yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi selama tahun anggaran 2019 – 2021.

Belanja pemerintah pusat sebagai bagian penting dari belanja negara, berfungsi untuk mendukung aktivitas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks APBN 2021, peran ini sangat signifikan dalam mengatasi tantangan seperti penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan konsolidasi fiskal. Di Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran untuk Kementerian dan Lembaga di tingkat provinsi, yang dicantumkan dalam DIPA hingga akhir 2021, mengalami penurunan 25,14% menjadi Rp46,78 triliun. Pada tahun yang sama, Kementerian

PUPR memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp10,97 triliun, menunjukkan fokus penting pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Diharapkan, perubahan alokasi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut (Barat, 2021). Maka dari itu, evaluasi dan restrukturisasi program-program pemerintah perlu dilakukan, agar hal tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi program yang lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Hasil riset ini sejalan dengan riset Sularso & Restianto (2011) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap belanja modal begitu juga dengan penelitian Anggraeni (2016) bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

6. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yakni variabel kinerja keuangan pemda dengan rasio ketergantungan ini diperoleh 0,045 yang artinya lebih kecil dari nilai alpha 0,05 serta hasil t-hitung sebesar -2,039 yang jika dilihat dari kurva uji t nilai ini berada pada penolakan H_0 artinya H_6 diterima.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil memenuhi 40 dari 44 kriteria yang telah ditetapkan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam

pencapaian standar tertentu. Meskipun demikian, terdapat empat kriteria yang belum terpenuhi, menunjukkan bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Keempat kriteria tersebut meliputi beberapa aspek penting, yaitu pertama, belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat secara efektif mengidentifikasi pengguna. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu membiayai seluruh atau sebagian besar belanja pemerintah daerah. Ketiga, terdapat kekurangan dalam mekanisme untuk menghitung dampak inefisiensi yang ditimbulkan oleh spillover dan eksternalitas, serta masih belum terbentuknya mekanisme validasi yang tepat terhadapnya. Keempat, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan pencapaian keseluruhan kriteria desentralisasi fiskal yang ditetapkan. Dalam konteks ini, langkah-langkah lebih lanjut dan inovasi dalam pengelolaan barang publik, perencanaan keuangan daerah, serta evaluasi dampak ekonomi akan sangat relevan dalam memenuhi kriteria yang belum terpenuhi tersebut (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021).

Rasio desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dengan arah hubungan yang negatif, yang membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat rasio desentralisasi fiskal maka PAD-nya rendah sehingga alokasi belanja modal akan lebih kecil dalam penggunaannya. Dengan kata lain rasio desentralisasi fiskal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat masih rendah dan bergantung terhadap pemerintah pusat. Hasil riset ini sejalan dengan riset Devi, Masnila &

Nurhasanah (2022) bahwa derajat Desentralisasi fiskal memiliki hubungan signifikan dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa H_6 diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ditemukan dalam penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Modal dengan positif dan signifikan pada seluruh kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang didapat oleh daerah dalam bentuk PAD, akan dibarengi pula dengan peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh positif dan hubungan yang signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat, maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal juga akan bertambah.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan kata lain masih pemda masih bergantung pada pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat salah satunya dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini membuktikan bahwa kondisi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan maka

pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini bahwa penda kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat dikatakan belum memiliki kemandirian yang maksimal sehingga dalam mengalokasikan dana belanja modal masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berupa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan ini sangat kurang dalam kinerjanya yang dilihat dari derajat desentralisasi tahun anggaran 2019-2021. Dengan kata lain, dalam tiga tahun anggaran pada pemerintah Kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat belum optimal penyelenggaraan desentralisasi dengan meningkatkan kontribusi PAD yang semakin tinggi pada kurun waktu satu periode berjalan

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini terdapat masalah pada uji autokorelasi yang mulanya belum terbebas dari uji autokorelasi. Oleh karena itu dalam pengujian autokorelasi *Durbin-Waston* menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* sehingga dapat terbebas dari uji autokorelasi.
2. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas dengan menggunakan beberapa variabel saja

C. Saran

1. Saran untuk kegunaan akademik yakni penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
2. Saran untuk penelitian lanjutan yakni agar bisa merubah/menambah variabel independen yang ada dalam penelitian ini dengan variabel DAK, SILPA dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap belanja modal serta hubungan antar variabel tersebut.
3. Dalam variabel kinerja keuangan pemda, peneliti hanya menggunakan beberapa rasio saja sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti dengan lebih lengkap pada penggunaan rasionya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, D. Z. I., Hendayana, Y., Hidayat, F., Handini, D., Herlina, N., Priandono, T. E., Napitupulu, E., Maek, I., Rhisky, N., Suwitno, Santosa, J., Taufik, M., Herlina, S., Fajri, M. S., Kusuma, A., Purwadi, Puspaputri, E., & Setyawati, N. (2021). Kaleidoskop 2020, Membangun Sinergi, Membangun Kolaborasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri.
- Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Upp Stim Ykpn.
- Bappeda Jabar. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021*. [Http://Bappeda.Jabarprov.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Rkpd-Provinsi-Jawa-Barat-Tahun-2021.Pdf](http://Bappeda.Jabarprov.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Rkpd-Provinsi-Jawa-Barat-Tahun-2021.Pdf)
- Barat, K. D. P. P. J. (2021). *Kajian Regional Fiskal Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Danius, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Skripsi*.
- Gartika, D., Ramon, Diana, M., Hapiah, Y., Khotimah, F. K. H., Gumilar, & Nursidiawati, I. (2022). *Laporan Kajian Evaluasi Implementasi Dan Strategi Optimalisasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 312–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.V3i4.88>
- <https://jabarprov.go.id/berita/ridwan-kamil-pertumbuhan-ekonomi-jabar-tertinggi-se-pulau-jawa-8388>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-evaluasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah>
- Indonesia, B. P. K. R. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. In *Lhr Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020*.
- Karyadi, S. A., & Tamam, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1–15.
- Nengsih, N. K. (2021). *Laporan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn Provinsi Jawa Barat*. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. https://dpmpstsp.jabarprov.go.id/Asset_New/Laporan/Kajian_Investasi/Laporan_Kajian_Realisasi_Investasi_Tw_4_2021.Pdf
- Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana

- Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013. *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Purpitasari, P. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1–16.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), 1–9.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i1.6609>
- Abdullah, S & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal 1140-1159.
- Akbar, C. (2021). *Sri Mulyani Soroti Dana Alokasi Umum untuk Daerah Habis Buat Belanja Pegawai*. <https://bisnis.tempo.co/read/1505585/sri-mulyani-soroti-dana-alokasi-umum-habis-buat-belanja-pegawai>
- Anthony, R. N., & V. Govindarajan. (2005). *Management control systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar, A. A., & Hermanto, S. B. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (8).
- Danius, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Skripsi*.
- Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 4 (6).
- Dwirandra, A., & Martini, K. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1).

- Fathiyah, F., Iskandar N, Pasla, B. N., Rasid, Fahmi., & Arif, Muhammad. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Fikri, A. (2019) *60 Persen Jalan Provinsi Jabar Akan Memasuki Batas Umur Konstruksi*. <https://bisnis.tempo.co/read/1243678/60-persen-jalan-akan-memasuki-batas-umur-konstruksi>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: UNDIP
- Hairiyah., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, 14 (2).
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Harahap, Heri Faisal. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No.1
- Huda, S. & Sumiati, A. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 6(3), 480–487.
- Ikhsan, A., & H.B Suprasto. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal Emba*, Vol. 8, No. 3
- Jefri, Riny. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI Unibos Makassar*, Vol. 4, No. 3
- Juniawan, M. A. (2018). Pengaruh PAD, DAK dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No.3

- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3*
- Karlimat, D., Rachman, D., & Anggareni, I. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi 13 (1), 27-37*.
- Karyadi, S. A., & Tamam, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Akuntansi, 1-15*.
- Kristianus, A. (2022). *Pembatasan Belanja Pegawai Beratkan Pemda*. <https://investor.id/business/289773/pembatasan-belanja-pegawai-beratkan-pemda>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nasution, Leni Masnidar. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah, 14 (1)*
- Nugraha, Billy (2022). *Pengembangan Uji Statistik*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Nugroho, F., & Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Undip, 1 (2), 1-14*.
- Oktriniatmaja, R. (2011). Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *Tesis*.
- Olivia, G. (2018). *Menkeu: Ketergantungan APBD Pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi, 3(2)*.
- Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013. *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Purpitasari, P. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 1–16.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No. 1*
- RM, R. D. C., & Mulyani, H. (2012). *Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat*. 47–57.
- Salsabila, N. F., & Rahayu, S (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019 dan 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5)
- Silondae, S. (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN.
- Sularso, Havid., & Restianto, Y, E. (2011). *Media Riset Akuntansi*, 1 (2).
- Supriyadi, A. P., & Ahmad, F. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta periode 2015-2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 39–43.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.
- Thomas, V. F. (2019). *70% APBD Buat Urusan PNS, Sri Mulyani Minta Pemda Potong Uang Dinas*. <https://tirto.id/70-apbd-buat-urusan-pns-sri-mulyani-minta-pemda-potong-uang-dinas-elFh>.
- Tiara, ferani inggrid. (2016). Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di. *Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya*.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wahyuningsih, P., & Widaryanti. (2015). Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*
- Widyastuti, Tri. (2017). *Akuntansi Biaya; Pendekatan Activity Based Costing*. Yogyakarta: Expert.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Vol. 5, No.2*.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Cakrawala - Repositori IMWI*.





LAMPIRAN

Lampiran I

Data PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

NO	KAB/KOTA	Tahun	X1	X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Y
1	Kota Bekasi	2019	2442.15	1277.17	69.78	74.6	29.30	40.95	1104.38
2	Kota Bekasi	2020	2048.91	1147.63	59.98	87.39	61.31	73.79	790.05
3	Kota Bekasi	2021	2536.71	1137.89	73.54	100	29.65	43.98	1189.3
4	Kab. Karawang	2019	1356.32	1325.36	28.57	95.89	54.18	28.99	703.2
5	Kab. Karawang	2020	1303.35	1211.64	29.53	102.31	54.23	29.80	277.22
6	Kab. Karawang	2021	1651.85	1199.91	35.24	129.96	50.43	33.36	955.6
7	Kab. Bekasi	2019	2439.37	1264.78	59.13	111.56	38.04	43.00	954.9
8	Kab. Bekasi	2020	2384.14	1105.27	58.2	97.45	38.30	42.89	670
9	Kab. Bekasi	2021	2544	1096.9	58.29	100.54	38.15	42.29	726.06
10	Kota Depok	2019	1293	950.37	52.22	116.06	38.25	39.95	926.09
11	Kota Depok	2020	1214.94	844	48.43	95.7	40.94	39.71	705.05
12	Kota Depok	2021	1536.97	843.69	62.1	114.93	36.21	45.26	701.37
13	Kota Bogor	2019	1015.88	856.52	39.18	107.56	44.83	39.68	500.98
14	Kota Bogor	2020	872.02	762.56	69.1	80.48	45.79	35.91	276.16
15	Kota Bogor	2021	1075.24	751.86	62.66	111.2	15.84	40.66	1127.14
16	Kab. Bogor	2019	3161.17	2089.13	46.61	123.75	44.33	38.84	1567.69
17	Kab. Bogor	2020	2810.16	1849.8	44.6	95.55	44.23	36.56	1488.95

18	Kab. Bogor	2021	3761.91	1863.2	55.2	136.78	40.15	41.23	1701.25
19	Kab. Purwakarta	2019	420.35	896.23	15.66	90.42	65.54	19.37	329.29
20	Kab. Purwakarta	2020	428.08	810.27	15.95	79.68	64.84	19.48	234.35
21	Kab. Purwakarta	2021	515.75	799	18.53	90.78	61.23	21.46	305.96
22	Kota Bandung	2019	2548.26	1798.1	51.25	83.41	38.92	39.93	1179.43
23	Kota Bandung	2020	2063.78	1589.63	41.22	61.8	44.18	36.57	558.48
24	Kota Bandung	2021	2195.97	1566.04	44.25	66.52	42.08	37.61	721.57
25	Kota Cimahi	2019	360.96	598.84	20.23	81.25	58.83	25.18	260.34
26	Kota Cimahi	2020	375.69	539.72	21.04	90.9	60.84	25.77	97.24
27	Kota Cimahi	2021	405.1	530.43	24.49	117.72	54.17	26.65	247.06
28	Kab. Bandung Barat	2019	528.09	1131.83	14.97	90.88	64.81	18.19	338
29	Kab. Bandung Barat	2020	464.82	1022.49	15.39	75.67	59.65	18.37	470.09
30	Kab. Bandung Barat	2021	540.78	1010.89	15.7	83.91	64.35	19.28	346.13
31	Kab. Sumedang	2019	463.53	1180.85	11.44	87.42	65.49	15.10	605.7
32	Kab. Sumedang	2020	444.43	1065.25	12	80.31	66.61	15.30	498.5
33	Kab. Sumedang	2021	470.28	1058.91	13.21	86.84	66.72	16.58	353.17
34	Kab. Bandung	2019	1025.35	2159.83	14.45	120.73	64.53	17.89	1088.25
35	Kab. Bandung	2020	1019.36	1967.82	15.89	101.27	62.83	19.07	733.92
36	Kab. Bandung	2021	1095.97	1947.25	15.5	113.03	63.99	19.05	706.78
37	Kab. Sukabumi	2019	619.79	1654.34	11.64	111.32	69.88	15.25	603.79
38	Kab. Sukabumi	2020	660.86	1494.7	13.88	103.78	65.27	16.83	449.1
39	Kab. Sukabumi	2021	676.56	1491.04	12.67	103.61	68.03	16.17	510.59
40	Kab. Subang	2019	463.31	1328.86	11.25	97.8	69.87	15.21	458.84
41	Kab. Subang	2020	461.45	1198.94	11.88	84.7	67.86	15.41	257.95

42	Kab. Subang	2021	494.54	1181.97	12.21	80.44	67.18	15.69	371.02
43	Kab. Cianjur	2019	628.56	1627.02	12.08	104.32	67.21	15.73	690.65
44	Kab. Cianjur	2020	577	1472.42	12.27	81.29	65.47	15.02	384.91
45	Kab. Cianjur	2021	792.91	1483.41	16.42	118.38	63.98	19.55	384.53
46	Kota Sukabumi	2019	330.95	524	16.68	111.32	60.07	26.76	192.38
47	Kota Sukabumi	2020	343.76	471.84	23.29	103.78	63.40	28.80	133.84
48	Kota Sukabumi	2021	344.4	463.57	23.04	103.61	59.91	27.68	135.68
49	Kab. Indramayu	2019	450.06	1433.69	9.62	102.38	64.79	11.61	982.69
50	Kab. Indramayu	2020	504.69	1297.01	11.84	108.91	70.16	15.23	317.73
51	Kab. Indramayu	2021	529.95	1282.97	12.34	98.15	69.14	15.76	306.79
52	Kota Tasikmalaya	2019	290.97	835.07	11.84	97.62	60.25	15.07	445.5
53	Kota Tasikmalaya	2020	314.31	753.32	14.13	105.29	61.97	17.85	321.92
54	Kota Tasikmalaya	2021	445.34	742.1	19.41	145.34	55.33	21.92	381.03
55	Kab. Tasikmalaya	2019	288.29	1517.26	5.92	112.05	67.38	7.52	636.91
56	Kab. Tasikmalaya	2020	305.89	1381.19	6.94	108.21	66.82	8.51	567.24
57	Kab. Tasikmalaya	2021	375.03	1375.99	8.26	112.45	76.17	11.57	239.41
58	Kota Cirebon	2019	434.21	600.61	22.18	90.75	52.08	28.14	269.92
59	Kota Cirebon	2020	437.21	545.29	25.27	84.07	51.96	26.76	294.35
60	Kota Cirebon	2021	401.09	536.52	25.62	77.59	58.02	29.78	113.1
61	Kab. Cirebon	2019	638.42	1591.97	12.93	106.85	66.14	15.90	587.83
62	Kab. Cirebon	2020	615.52	1417.09	13.4	95.5	66.44	16.32	296.95
63	Kab. Cirebon	2021	680.58	1406.29	14.2	101.33	66.14	17.21	361.54
64	Kab. Majalengka	2019	439.84	1252.08	11.21	92.9	70.40	14.84	643.66
65	Kab. Majalengka	2020	490.88	1127.92	12.75	89.38	65.46	15.15	792.44

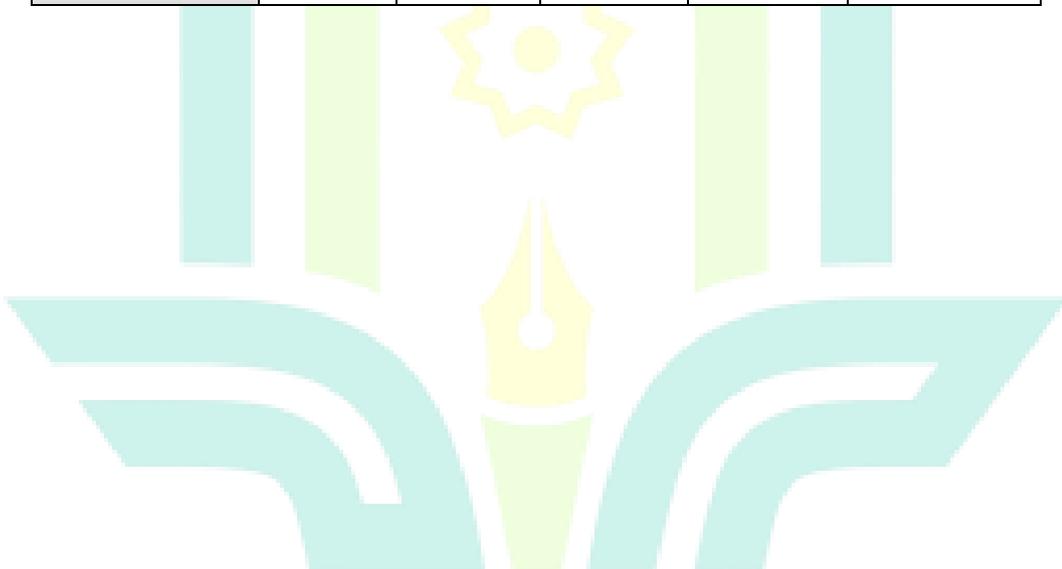
66	Kab. Majalengka	2021	466.79	1112.16	11.96	83.4	69.76	15.20	590.73
67	Kab. Garut	2019	486.57	1843.83	17.79	102.88	70.31	10.15	553.08
68	Kab. Garut	2020	474.64	1663.19	18.37	94.73	68.68	10.55	463.04
69	Kab. Garut	2021	560.78	1665.91	19.3	115.88	69.63	11.97	558.8
70	Kab. Kuningan	2019	301.4	1243.4	17.78	91.04	75.35	10.97	251.91
71	Kab. Kuningan	2020	298.73	1122.1	18.07	92.36	72.07	10.80	378.7
72	Kab. Kuningan	2021	343.86	1111.94	19.16	101.99	72.87	12.38	320.73
73	Kab. Ciamis	2019	264.28	1233.74	16.75	111	70.09	8.96	520.32
74	Kab. Ciamis	2020	254.19	1112.35	17.08	100.58	73.33	9.70	416.8
75	Kab. Ciamis	2021	273.5	1099.39	17.59	108.03	72.23	10.23	402.63
76	Kab. Pangandaran	2019	114.81	569.05	16.08	79.22	67.00	7.79	499.05
77	Kab. Pangandaran	2020	105.28	508.88	15.75	42.16	57.87	6.70	464.68
78	Kab. Pangandaran	2021	175.13	505.2	18.53	50.03	72.81	13.14	375.71
79	Kota Banjar	2019	100.75	389.66	18.85	76.39	41.40	7.56	208.99
80	Kota Banjar	2020	119.43	351.74	19.09	88.07	76.26	15.33	57.42
81	Kota Banjar	2021	127.1	346.71	19.56	94.31	74.42	16.97	59.28





Lampiran II
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	81	100.75	3761.91	855.7809	809.41553
DAU	81	346.71	2159.83	1143.4419	441.80468
RKM	81	5.92	73.54	25.0668	17.57621
REF	81	42.16	145.34	96.9067	17.20952
RKT	81	15.84	76.26	59.1930	12.87596
RDS	81	6.70	73.79	22.7573	12.47088
BM	81	57.42	1701.25	539.4298	337.72877
Valid N (listwise)	81				



Lampiran III

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.49215332
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.038
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran IV

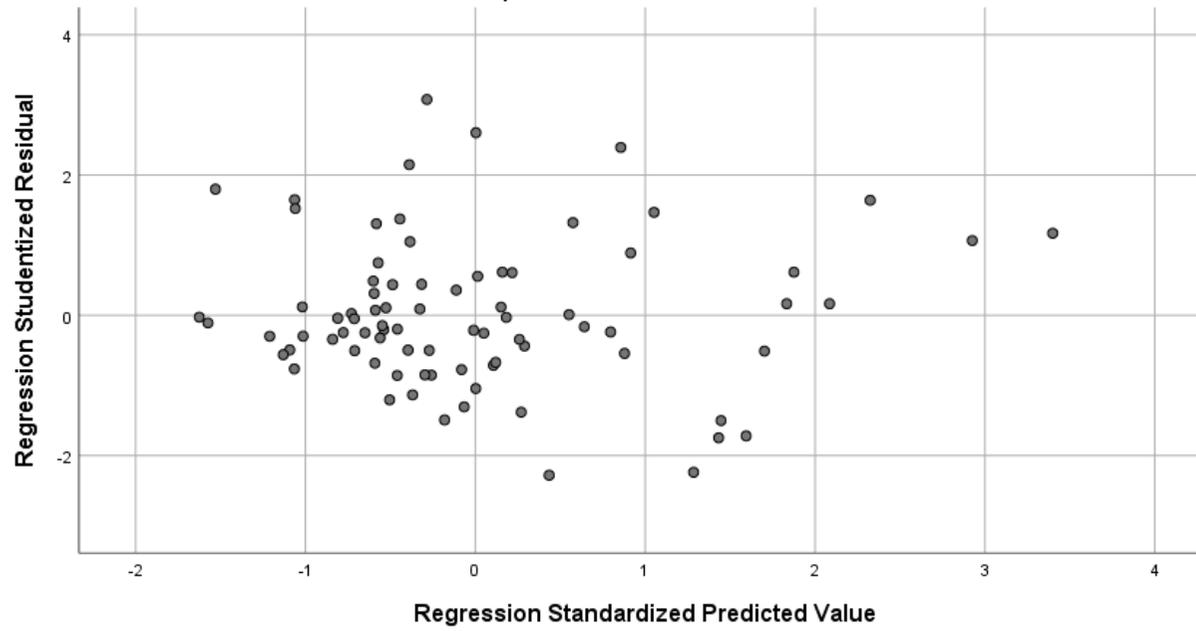
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047		
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001	.126	7.944
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002	.343	2.917
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715	.122	8.219
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149	.872	1.146
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010	.234	4.267
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045	.182	5.487
a. Dependent Variable: BM								

Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot Model

Scatterplot

Dependent Variable: BM

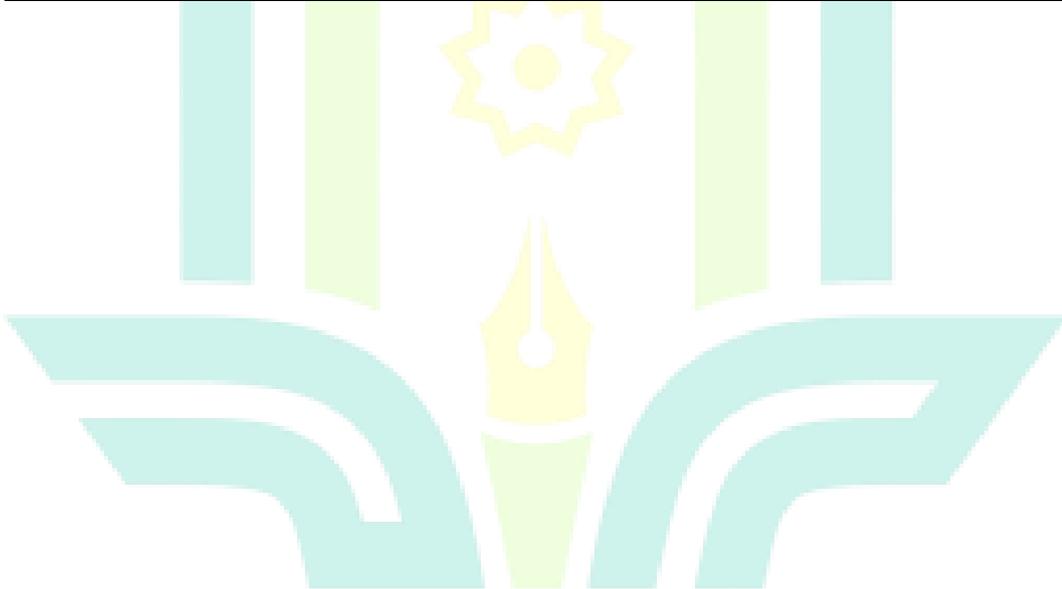


Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	284.833	153.230		1.859	.067
	PAD	.012	.041	.089	.291	.772
	DAU	.043	.045	.177	.951	.345
	RKM	-.604	1.902	-.099	-.317	.752
	REF	-1.437	.726	-.231	-1.981	.051
	RKT	-1.448	1.871	-.174	-.774	.441
	RDS	1.001	2.190	.117	.457	.649

a. Dependent Variable: ABS_RES



Lampiran VI

Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.998	.998	33.21941	1.737
a. Predictors: (Constant), LAG_X3.4, LAG_X1, LAG_X2					
b. Dependent Variable: LAG_Y					

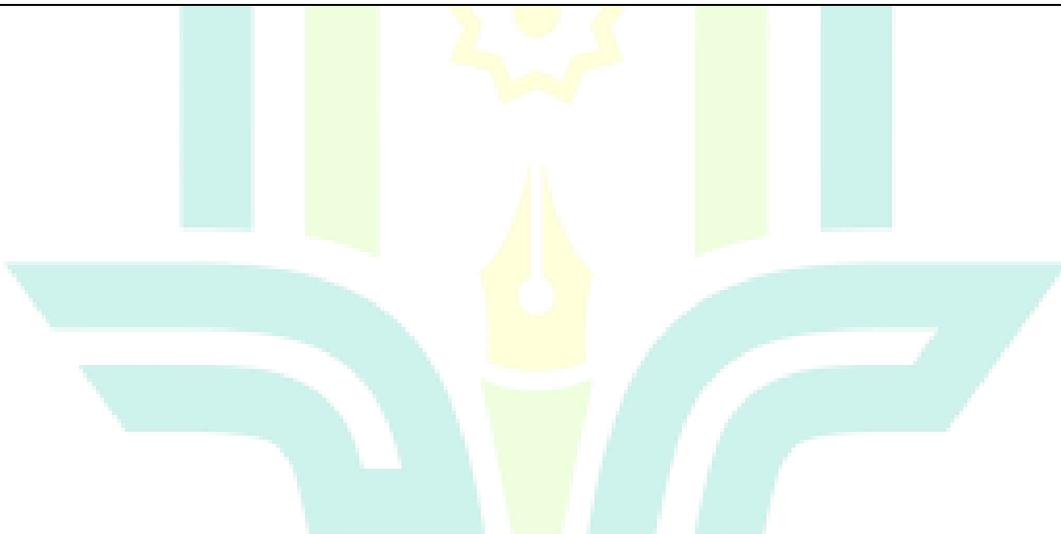


Lampiran VII

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045

a. Dependent Variable: BM

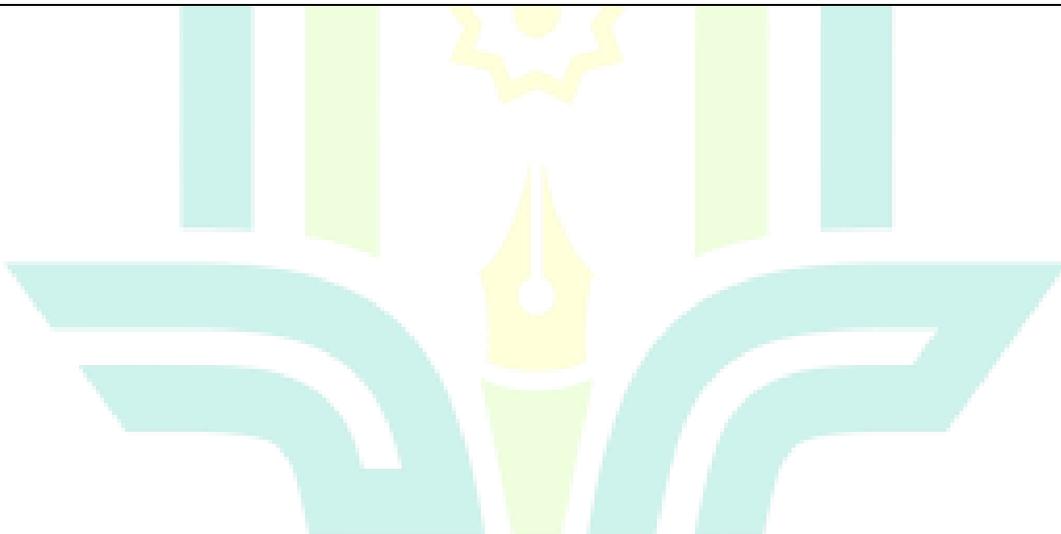


Lampiran VIII

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	514.193	254.149		2.023	.047
	PAD	.240	.067	.576	3.571	.001
	DAU	.243	.075	.318	3.249	.002
	RKM	1.157	3.155	.060	.367	.715
	REF	1.754	1.203	.089	1.458	.149
	RKT	-8.257	3.103	-.315	-2.661	.010
	RDS	-7.408	3.633	-.274	-2.039	.045

a. Dependent Variable: BM

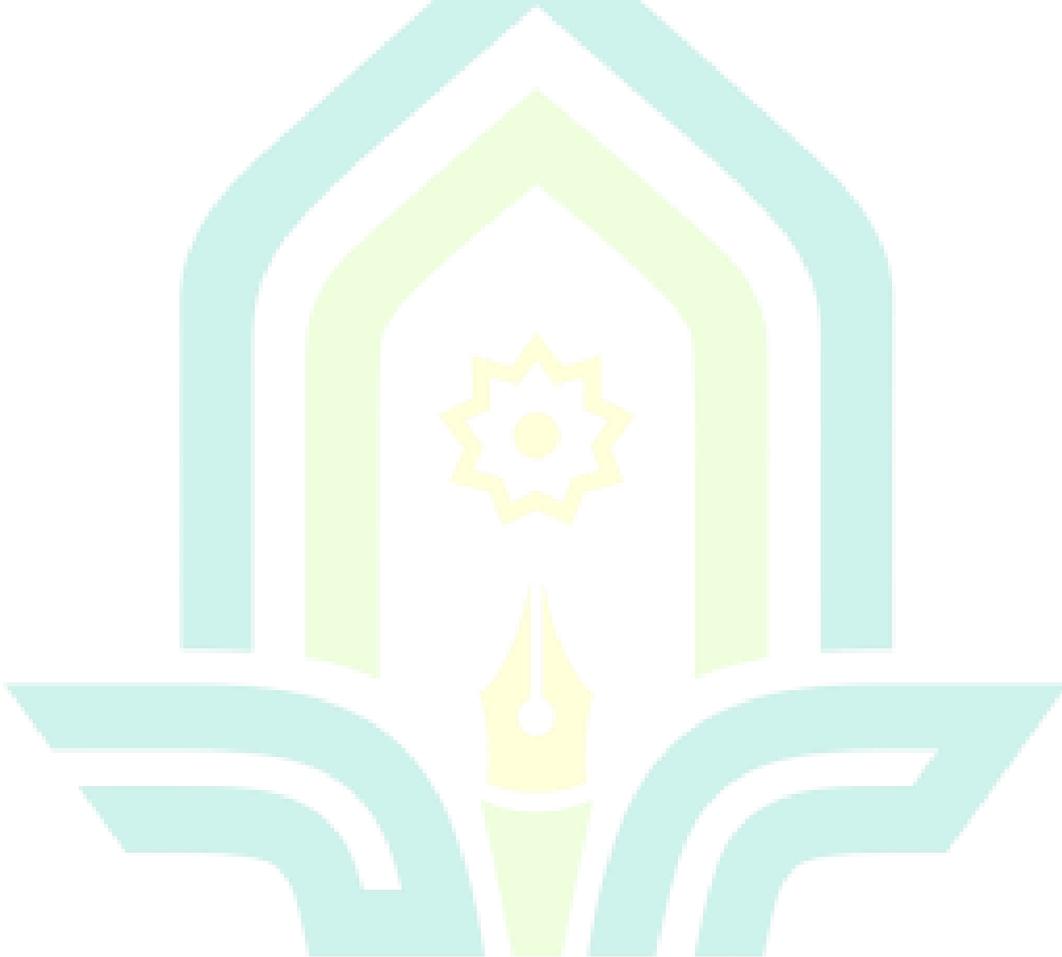


Lampiran IX

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.757	.738	172.99550

a. Predictors: (Constant), RDS, DAU, REF, RKT, PAD, RKM



Lampiran X

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	40
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	41
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	42
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	43
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	44
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	45
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	46
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	47
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	48
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	49
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	50
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	51
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	52
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	53
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	54
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	55
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	56
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	57
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	58
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	59
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	60
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	61
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	62
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	63
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	64
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	65
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	66
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	67
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	68
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	69
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	70
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	71
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	72
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	73
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	74
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	75
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	76
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	77
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	78

Lampiran XI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Indah Wulandari Wilujeng
NIM : 4319154
Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 31 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Moekhammad Toelus
Nama Ibu : Ekha Lestari
Alamat : Ds. Kauman RT07/RW04 Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

RIWAYAT HIDUP

- | | |
|---|------------------|
| 1. RA Muslimat Kauman | Lulus Tahun 2007 |
| 2. MI Salafiyah Kauman | Lulus Tahun 2013 |
| 3. SMPN 1 Wiradesa | Lulus Tahun 2016 |
| 4. SMKN 2 Pekalongan | Lulus Tahun 2019 |
| 5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan | Lulus Tahun 2023 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 9 Juli 2023

Penulis



Indah Wulandari Wilujeng



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INDAH WULANDARI WILUJENG
NIM : 4319154
Program Studi : AKUNTANSI SYARIAH / FEBI
Email : indahww07@gmail.com
No. Hp : 0896-6627-0854

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2019-2021**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 September 2023



**INDAH WULANDARI WILUJENG
NIM : 4319154**